



PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI



PROFIL GENDER DAN ANAK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020



2022

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BUKITTINGGI



PROFIL GENDER DAN ANAK
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2022

TIM PENULIS:

Pengarah : TATI YASMARNI, SE,MM
Penanggung Jawab : NIRZA SASMITA, S.Sos, MM
Penyusun buku : NINI RAHMI, SKM, MM

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat dan hidayah Nya kepada kita semua, sehingga Tim Penulis telah dapat menyelesaikan penulisan buku “Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2022”. Shalawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan buku ini dilakukan dalam rangka menyediakan data dan informasi gender dan anak di Kota Bukittinggi Tahun 2022. Dalam buku ini disajikan profil perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan. Buku ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bukittinggi.

Kami menyadari dalam penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan gender banyak masalah yang belum terpecahkan akibat dari kurang tersediaan data yang relevan sampai sekarang sehingga kesetaraan dan keadilan gender belum terwujud secara optimal. Diharapkan dengan adanya buku ini OPD dan stakeholder lainnya dapat memanfaatkannya sebagai bahan pengambilan kebijakan pembangunan di bidang masing-masing.

Buku ini dapat kami susun berkat adanya jalinan kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dengan beberapa pihak terkait.

Oleh karena itu pada kesempatan ini Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tim Penulis yang telah bekerjasama dalam melaksanakan penulisan buku ini

2. Bapak / Ibu Kepala OPD , Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, Organisasi Perempuan dan LSM di Kota Bukittinggi yang telah memberikan berbagai sumbangan pemikiran saran dan masukan yang sangat berarti untuk kesempurnaan buku ini.
3. Bapak/Ibu anggota kelompok kerja Data terpilah Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2022, yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan sumbangan saran /pemikiran dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan buku ini.

Semoga semua dukungan dan bantuan yang diberikan menjadi amal shaleh disisinya.

Kami menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala kritik, saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, September 2022
Kepala Dinas P3APPKB
Kota Bukittinggi



TATI YASMARNI, SE, MM
NIP. 19630629 198302 2001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Kegunaan Buku profile Gender dan Anak	6
E. Sumber Data	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH	10
A. Letak Geografis	10
B. Batas Administrasi Wilayah	10
C. Visi dan Misi Kota Bukittinggi.....	13
BAB III STRUKTUR KEPENDUDUKAN	14
A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin	14
B. Penduduk Produktif / Beban Ketergantungan	16
C. Penyebaran Penduduk	19
D. Komposisi Penduduk Menurut Wajib KTP	20
E. Kepemilikan Akte Kelahiran untuk Anak	21
F. Laju Pertumbuhan Penduduk	23
G. Komposisi Penduduk menurut Status Perkawinan	25
H. Kepala Keluarga Perempuan	26
BAB IV PENGARUSUTAMAAN GENDER	28
A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	29
B. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	30
C. Sumbangan Pendapatan Perempuan.....	31
D. Perempuan sebagai tenaga profesional	32
E. Keterlibatan Perempuan di Parlemen	34
BAB V DATA GENDER DAN ANAK BIDANG PENDIDIKAN	35
A. Angka Partisipasi sekolah.....	36
B. Angka Partisipasi Kasar.....	38
C. Angka Partisipasi Murni	39
D. Melek Huruf dan Buta Huruf	41
E. Rata-rata Lama sekolah	42
F. Tingkat Pendidikan	44
BAB VI. BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	47
A. Angka harapan Hidup	47
B. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)	49

1. Penyebab Kematian Ibu.....	51
2. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Linakes) dengan Kompetensi Kebidanan.....	51
3. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (<i>Antenatal Care</i>)	52
4. Immunisasi Tetanus Toxoid dan Difteri (Td) pada Ibu Hamil	54
5. Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe)	57
C. Angka Kematian Bayi (AKB)	58
1. Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif (0-6 bulan)	59
2. Pelayanan Kesehatan Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	61
3. Pelayanan Immunisasi Lengkap Pada Bayi 0-11 Bulan	62
4. Status Gizi pada Balita	63
D. Stunting	64
E. Posyandu	67
F. Penderita HIV / AIDS	68
G. Keluarga Berencana	69
H. Usaha Perkawinan Pertama	72
I. Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)	73
BAB VII EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN.....	75
A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	75
B. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	77
C. Status Pekerjaan	78
D. Kemiskinan	79
E. Pendidikan Tertinggi Penduduk Bekerja di Kota Bukittinggi Th, 2021.....	81
F. Penduduk bekerja menurut kelompok umur	82
G. Dampak covid 19 terhadap penduduk usia kerja	82
H. Lapangan Usaha	83
I. Usaha Mikro dan Kecil (UKM).....	86
J. Pekerja pada Instansi Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah .	88
BAB VIII BIDANG POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN	91
A. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	92
B. Peran dan Komposisi Perempuan di Lembaga Eksekutif	94
1. Aparatur Sipil Negara (ASN)	94
2. Perempuan Menduduki Jabatan Eselon.....	96
3. Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin	97
4. Camat.....	98
5. Jumlah Lurah di Kota Bukittinggi.....	98
C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif	99
1. Jaksa Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	99
2. Hakim Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin.....	100

3. POLRI Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin.....	101
D. Pengurus Organisasi Sosial, Masyarakat dan Politik	102
1. Data Organisasi Sosial, Masyarakat dan Politik.....	102
2. Pengurus Harian Partai Politik.....	104
3. Kaukus Perempuan Politik	104
BAB IX BIDANG HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA	105
A. Kasus kriminalitas yang ditangani	106
B. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Bukittinggi	106
1. Anak Terlantar.....	106
2. Anak yang ditampung di Panti Asuhan.....	107
3. Bekas warga Binaan Lembaga masyarakat	107
4. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	108
5. Penyandang Disabilitas.....	108
6. Jumlah Pekerja Sosial, Karang Taruna, Tenaga Kerja sosial di Kota Bukittinggi tahun 2021	110
BAB X KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	111
A. Kekerasan Terhadap Perempuan	111
B. Kekerasan Terhadap Anak	119
BAB XI INDEKS KUALITAS KELUARGA	123
BAB XII PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133
1. Ketersediaan data.....	133
2. Pengarusutamaan Gender	133
3. Kependudukan	134
4. Pendidikan.....	135
5. Kesehatan	135
6. Ekonomi dan ketenagakerjaan	136
7. Politik dan pengambilan keputusan	137
8. Hukum dan social budaya	137
9. Kekerasan terhadap perempuan dan anak.....	137
10. Indeks ketahanan keluarga.....	138
B. Saran	138

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Bukittinggi	11
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2021	15
Tabel 3.2	Persentase komposisi Penduduk dan angka beban ketergantungan, kota bukittinggi 2018-2021	17
Tabel 3.3	luas wilayah, Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan laju Pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di kota Bukittinggi, 2021	19
Tabel 3.4	jumlah Penduduk yang wajib memiliki KTP dan telah memiliki KTP Elektronik Per Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2021	21
	15
Tabel 3.5	Persentase Anak Usia 0-18 tahun yang memiliki Akte kelahiran menurut jenis kelamin per kecamatan di kota Bukittinggi Tahun 2021	22
Tabel 3.6	Laju Pertumbuhan penduduk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021	23
Tabel 3.7	jumlah kepala keluarga berdasarkan status perkawinan hasil pendataan keluarga dikota bukittinggi tahun 2021	25
Tabel 3.8	persentase kepala rumah tangga menurut jenis kelamin di kota bukittinggi tahun 2021	26
Tabel 5.1	Persentase Penduduk berumur 15 Tahun ke atas yang melek huruf Menurut Jenis Kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2019 sampai 2021.....	42
Tabel 5.2	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/ STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi, 2021.....	45
Tabel 6.1	Penyebab kematian Ibu Tahun 2021	51
Tabel 6.2.	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Pernah Melahirkan dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Kota Bukittinggi 2019 – 2021.....	52
Tabel 6.3.	Cakupan Pelayanan <i>Antenatal Care</i> Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2021.....	53
Tabel 6.4.	Cakupan Imunisasi Td pada Ibu Hamil menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2021	55
Tabel 6.5.	Cakupan Imunisasi Td pada Wanita Usia Subur menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2021	56
Tabel 6.6.	Cakupan Tablet Fe pada Bumil Per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2021	58
Tabel 6.7.	Cakupan Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2021	60
Tabel 6.8.	Cakupan BBLR yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2021	61
Tabel 6.9.	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2021.....	62
Tabel 6.10.	Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U, dan BB/TB Menurut Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2021	63

Tabel 6.11.	Jumlah Keluarga Sasaran Menurut Penapisan Potensi Resiko Stunting Tahun 2021	66
Tabel 6.13.	Jumlah Posyandu menurut Strata Posyandu Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2021	67
Tabel 6.14.	Cakupan Penderita HIV/AIDS berdasarkan Kelompok Umur di Kota Bukittinggi Tahun 2019	69
Tabel 6.15.	Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2021.....	71
Tabel 6.16.	Usia Perkawinan Pertama PUS PerKecamatan hasil pendataan Keluarga di Kota Bukittinggi tahun 2021	72
Tabel 6.17.	Capaian Kota layak Anak Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.....	74
Tabel 7.1.	Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2021	76
Tabel 7.2.	Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun keatas Yang Bekerja selama seminggu yang lalu menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Bukittinggi Tahun 2021	78
Tabel 7.3.	Jumlah Kepala Keluarga menurut Jenis Pekerjaan di Kota Bukittinggi Tahun 2021.....	83
Tabel 7.4.	Persentase Penduduk berumur 15 Tahun keatas Yang Bekerja di Kegiatan Informal menurut Pekerjaan utama di Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	84
Tabel 7.5.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi, 2021	85
Tabel 7.6.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi, 2021.	85
Tabel 7.7.	Jumlah Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	86
Tabel 7.8.	Data Jumlah Tenaga Kerja menurut Jenis Kelamin pada UMKM Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	86
Tabel 7.9.	Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Koperasi Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2021	87
Tabel 7.10.	Partisipasi Perempuan sebagai Pengurus Koperasi Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020	88
Tabel 7.11.	Persentase Kepala Keluarga Miskin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2021	88
Tabel 7.12.	Tenaga kerja di lembaga/BUMN/BUMD/instansi Vertikal	88
Tabel 7.13.	Tenaga Dosen, Karyawan dan Mahasiswa Perguruan Tinggi Tahun 2020 di Kota Bukittinggi	89
Tabel 7.14.	Jumlah Tenaga Kesehatan (Medis) di Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	90
Tabel 8.1.	Jumlah Anggota DPRD Kota Bukittinggi menurut Partai dan Jenis Kelamin, Kota Bukittinggi Tahun 2021	92
Tabel 8.2.	Jumlah Anggota DPRD Kota Bukittinggi menurut Komisi dan Jenis Kelamin, Kota Bukittinggi Tahun 2021	94

Tabel 8.3.	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021.....	95
Tabel 8.4	Jumlah ASN menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021	96
Tabel 8.5	Jumlah ASN menurut Esselon dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021	97
Tabel 8.6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin Tahun 2020	97
Tabel 8.7	Jumlah Camat di Kota Bukittinggi Tahun 2021	98
Tabel 8.8	Jumlah Lurah menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020	99
Tabel 8.9	Data Ketenagaan pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi Tahun 2021	100
Tabel 8.10	Data Hakim menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 .	100
Tabel 8.11	Data Kepolisian menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021	101
Tabel 8.12	Data Organisasi Mitra Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020	102
Tabel 8.13	Jumlah Pengurus Harian Partai Politik Menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2021	104
Tabel 9.1	Jumlah Kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi Tahun 2020.....	106
Tabel 9.2	Jumlah Anak yang Ditampung di Panti Asuhan di Kota Bukittinggi Tahun 2017, sampai dengan 2021	107
Tabel 9.3	Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017 s/d 2021	107
Tabel 9.4	Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2021.....	109
Tabel 9.5	Tabel Jumlah Pekerja Sosial, Karang Taruna, Tenaga Kerja Sosial di Kota Bukittinggi Tahun 2021.....	110
Tabel 10.1	Korban kekerasan terhadap perempuan menurut umur di kota Bukittinggi Tahun 2021.....	112
Tabel 10.2	Korban kekerasan terhadap perempuan menurut tingkat pendidikan di Kota Bukittinggi Tahun 2021	113
Tabel 10.3	Korban kekerasan terhadap perempuan menurut Status Pekerjaan di Kota Bukittinggi	113
Tabel 10.4	Korban kekerasan terhadap perempuan menurut status perkawinan di Kota Bukittinggi Tahun 2021	114
Tabel 10.5	Korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kekerasan di Kota Bukittinggi Tahun 2021.....	115
Tabel 10.6	Korban kekerasan terhadap perempuan menurut Tempat kejadian di kota Bukittinggi Tahun 2020.....	116
Tabel 10.7	Korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis Pelayanan di kota Bukittinggi Tahun 2021	117
Tabel 10.8	Korban kekerasan terhadap perempuan menurut Frekuensi Kekerasan di kota Bukittinggi.....	117
Tabel 10.9	Pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut Tingkat Pendidikan di kota Bukittinggi	118

Tabel 10.10	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan Dan Jenis Kelamin, Per Kecamatan Di Kota Bukittinggi 2021.....	119
Tabel 10.11	Lembaga Layanan Yang Menangani Anak Korban Kekerasan, Per Kecamatan Di Kota Bukittinggi Tahun 2021	121
Tabel 10.12	Jumlah Korban Kekerasan Pada Anak per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2021.....	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Kota Bukittinggi	11
Gambar 3.2	Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2021	27
Gambar 4.1	Indeks Pembangunan Gender Kota Bukittinggi Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021	30
Gambar 4.2	Grafik Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bukittinggi Tahun 2017 sampai 2021	31
Gambar 4.3	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan Kota Bukittinggi Tahun 2018 sd 2021	32
Gambar 4.4	Perempuan sebagai tenaga Profesional Kota Bukittinggi tahun 2018 sampai dengan tahun 2021	34
Gambar 5.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur di Kota Bukittinggi, 2019-2021	37
Gambar 5.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang Pendidikan di Bukittinggi Tahun 2020 dan 2021	38
Gambar 5.3	Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan di Kota Bukittinggi Tahun 2019 sampai 2021	40
Gambar 5.4	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kota Bukittinggi, 2017-2021	43
Gambar 6.1	Umur harapan Hidup Bukittinggi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021	48
Gambar 6.2	Jumlah Kematian Ibu di Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021	50
Gambar 6.3	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020	59
Gambar 7.1	Jumlah Penduduk Miskin (ribuan) dan Persentase Penduduk Miskin Kota Bukittinggi, 2017-2021	80
Gambar 7.2	jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut kelompok umur dikota Bukittinggi tahun 2021.....	82
Gambar 9.1	Jumlah Anak Terlantar Tahun 2018 sd 2021 di Kota Bukittinggi	107
Gambar 9.2	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2016 sd 2021	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesetaraan gender pada saat ini sangat berperan penting dalam pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pengertian gender dapat disebut sebagai perbedaan peran dan fungsi sosial antara laki-laki dan perempuan sesuai kodrat masing-masing. Perbedaan tersebut sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, kultur, sosial masyarakat, maupun negara. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara.

Kesetaraan Gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam peranan dan partisipasi di segala bidang. Jadi kesetaraan gender bukan hanya dimaknai dari segi perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan saja. Sementara itu keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumberdaya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Sedangkan memiliki control berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional bahwa setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2021 hasil proyeksi penduduk sebanyak 121.588 jiwa yang terdiri dari 60.816 jiwa laki-laki dan 60.772 jiwa perempuan dengan rasio jenis kelamin 100,07. Rasio ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki dan perempuan terdapat jumlah yang seimbang. Artinya keberadaan perempuan harus mendapatkan perhatian yang sama dengan laki-laki. Dibanding tahun lalu telah terjadi penurunan jumlah penduduk sekitar 560 jiwa. Struktur umur penduduk Bukittinggi masuk kategori kelompok umur muda, dimana persentase penduduk usia dibawah 15 tahun tergolong tinggi yaitu 25,41 persen, sedangkan kelompok penduduk usia tua (65 tahun ke atas) hanya 6,3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa berinvestasi untuk anak adalah berinvestasi untuk lebih seperempat penduduk Bukittinggi.

Gambaran kondisi perempuan dan anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambil kebijakan yang tepat. Perempuan dan anak merupakan kelompok penduduk yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan baik saat ini ataupun potensi untuk masa yang akan datang.

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah masih diukur berdasarkan Indeks pembangunan Manusia (IPM), atau *Human Development Index* (HDI), Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau *Gender Development Index* (GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Upaya dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka

wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak. Mengingat pentingnya data ini dalam proses perencanaan, maka pemerintah di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 13 ayat 1 mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang.

Data dan informasi yang dimaksud akan dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Terkait dengan hal tersebut, maka disusun buku “Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022” sebagai gambaran keadaan perempuan dan anak di Kota Bukittinggi secara menyeluruh di berbagai bidang kondisi data tahun 2021.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang mengacu tentang kesetaraan Gender, Perempuan dan Anak diantaranya;

1. UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
2. Pasal 28 C ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;

3. UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
4. UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ditambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1979);
6. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik.
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan “Profil Gender dan Anak Tahun 2021” dimaksudkan untuk melihat pemerataan pembangunan terhadap perempuan dan anak di Kota Bukittinggi yang berbasis data terpilah yang menggambarkan capaian pembangunan, permasalahan pembangunan dan upaya-upaya yang telah dan masih diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Oleh karena itu penulisan buku ini dapat memberikan gambaran secara umumberdasarkan aspek disperitas baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial, politik, ekonomi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta permasalahan-permasalahan lain yang dihadapi perempuan dan anak.

Secara lebih khusus, penyusunan Profil Gender dan Anak di Kota Bukittinggi tahun 2022 memiliki tujuan;

1. Tersedianya data terpilah Perempuan dan Anak di bidang Pendidikan, kesehatan, Ekonomi, Peran Perempuan di sektor publik, dan bidang-bidang yang menjadi isu Perempuan dan Anak di Kota Bukittinggi.
2. Tersedianya data kebijakan, program, kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan elemen masyarakat Kota Bukittinggi terkait upaya pemberdayaan perempuan di Kota Bukittinggi.
3. Tersedianya hasil analisis deskriptif tentang capaian pemberdayaan perempuan di Kota Bukittinggi . Analisis dilakukan berdasarkan ketersediaan data primer dan sekunder untuk melihat pencapaian indikator pemberdayaan Gender, meliputi partisipasi perempuan dan laki-laki di sektor Publik, bidang Pemerintahan, posisi di Parlemen, dan dalam pelaksanaan kebijakan, program kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Bukittinggi.

D. Kegunaan Buku Profile Gender dan Anak

Untuk memberikan rekomendasi bagi semua pihak khususnya bagi penyusun kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang.

Dengan tersedianya informasi yang ada dapat mendorong capaian pembangunan berkeadilan bagi perempuan dan anak di Kota Bukittinggi.

E. Sumber Data

Data – data yang disajikan dalam buku Profil Gender dan anak Kota Bukittinggi Tahun 2022 ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi , Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi, Instansi Vertikal di Kota Bukittinggi yang tergabung dalam Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-132-2022 tanggal 30 Mai 2022.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang penulisan profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi , lebih spesifik diperjelas dengan landasan hukum yang mengatur tentang pentingnya program perlindungan perempuan dan anak. Maksud dan tujuan diperuntukkan untuk melihat pemerataan pembangunan yang sudah dilaksanakan terhadap perempuan dan anak,

dari mana sumber data. Diakhir bab ini ditutup dengan Sistematika penulisan buku Profil Gender dan Anak.

Bab II Gambaran Umum Wilayah

Memuat tentang gambaran letak geografis, batas administrasi wilayah serta visi dan misi Kota Bukittinggi.

Bab III Struktur Kependudukan

Dalam bab ini memuat informasi tentang kependudukan berdasarkan jenis kelamin, penduduk produktif, penyebaran penduduk, kepemilikan KTP, akte kelahiran, Kartu Keluarga, penduduk miskin, status perkawinan dan Kepala keluarga perempuan.

Bab IV Pengarusutamaan Gender

Pada bab ini dijelaskan tentang pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bukittinggi dan dibandingkan dengan capaian di tingkat propinsi Sumatera Barat dan beberapa tahun terakhir.

Bab V Pendidikan

Memuat kondisi pendidikan di Kota Bukittinggi menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Kemudian diuraikan dengan angka terkait berdasarkan angka usia angka partisipasi sekolah, dan angka partisipasi murni. Angka partisipasi kasar, angka putus sekolah, rata-rata lama sekolah, sertifikasi guru, angka kelulusan paket A, B dan C, SLB dan penggunaan Teknologi Informasi.

Bab VI Kesehatan dan Keluarga Berencana

Pada umum ini disampaikan data terkait angka kematian ibu, penyebab kematian serta upaya yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Bukittinggi untuk peningkatan status kesehatan di Kota Bukittinggi, Data HIV AIDS, Keluarga Berencana, usia Perkawinan Pertama serta Penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

Bab VII Ketenagakerjaan

Bab ini menjelaskan tentang Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Status Pekerjaan, lapangan Usaha, pekerja sector formal dan informal, Usaha Mikro dan Kecil (UKM), Koperasi dan keterlibatan perempuan disektor ekonomi lainnya.

Bab VIII Perempuan di Sektor Publik Dan Pengambil Keputusan

Untuk perempuan dan pengambil keputusan, dalam bab ini memuat data yang berkaitan dengan pengambil keputusan langsung di pemerintahan dan dari sudut pandang partisipasi baik laki-laki maupun perempuan di bidang **Legislatif** yaitu; jumlah anggota partai politik menurut jenis kelamin dan jumlah anggota DPRD menurut jenis kelamin. Sedangkan di bidang **Eksekutif** memuat data tentang PNS menurut golongan jabatan dan jenis kelamin, dan PNS OPD menurut jenis kelamin. Dalam bidang **Yudikatif** yaitu memuat data jumlah Hakim, Jaksa dan Polisi menurut jenis kelamin di wilayah Kota Bukittinggi.

Bab IX Hukum dan Sosial Budaya

Dijelaskan pada Bab ini tentang kasus terkait Hukum, kebijakan terkait dengan Pengarusutamaan gender dan Anak serta kebijakan yang Responsive Gender, kebijakan terkait perempuan dan anak, Lembaga yang terkait peduli perempuan dan anak, serta data terkait bidang social dan budaya.

Bab X Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Digambarkan dalam bab ini tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan jenis kelamin, pelaku kekerasan, lokasi, latar belakang pendidikan dan pekerjaan serta hal-hal lain yang terkait dengan data tersebut.

Bab XI Indeks Kualitas Keluarga

Bab ini menjelaskan hasil dari Survey Indeks Kualitas Keluarga yang ditujukan kepada peserta Sekolah Keluarga yang terdapat di 24 keluarhan yang ada di Kota Bukittinggi, dengan mempedomani questioner, pengolahan dan Analisa dari Buku Ketahanan Keluarga yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016.

Bab XII Penutup

Memuat kesimpulan dan rekomendasi untuk pengambil keputusan menuju pemerataan keadilan bagi perempuan dan anak di Kota Bukittinggi.

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. Letak Geografis

Kota Bukittinggi adalah sebuah kota yang terletak di bagian utara Provinsi Sumatera Barat. Dua kata yang terhimpun jadi satu, mempunyai makna identik dengan letaknya pada ketinggian perbukitan. Kota ini memiliki luas 25,24 km² membentang antara 100°22' 03" Bujur Timur dan antara 00°17' 08" Lintang Selatan.

Posisi ini menjadikan iklim di Bukittinggi masuk kedalam iklim tropis. Letak Bukittinggi pada ketinggian antara 780 - 950 meter di atas permukaan laut, menyebabkan udara di Bukittinggi relatif sejuk dengan suhu berkisar antara 16.1–24.9°C dan cocok untuk tempat peristirahatan dan tujuan wisata.

Letak geografis ini cukup strategis, terutama bila dikaitkan dengan posisi sentral Bukittinggi terhadap lintasan regional antar ibukota provinsi, seperti lintasan dari Padang ke Medan, dan lintasan dari Padang ke Pekanbaru.

B. Batas Administrasi Wilayah

Secara administrasi Kota Bukittinggi berbatasan dengan beberapa wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Agam, yaitu :

1. Sebelah Utara :

Berbatasan dengan Nagari Gadut dan Kapau; Kecamatan Tilatang Kamang; Kabupaten Agam.

2. Sebelah Selatan:

Berbatasan dengan Taluak IV Suku; Kecamatan Banuhampu; Kabupaten Agam.

3. Sebelah Barat :

Berbatasan dengan Nagari Sianok, Guguk, dan Koto Gadang; Kecamatan IV Koto; Kabupaten Agam.

4. Sebelah Timur:

Berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang;
Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam.

Bukittinggi merupakan pusat kebudayaan Sumatera Barat, terletak di dataran tinggi sebelah utara Padang di bukit Agam. Berbeda dengan Padang yang merupakan pusat roda pemerintahan dan perdagangan *modern* maka Bukittinggi adalah kota yang tenang dihiasi oleh panorama alam yang sungguh tiada duanya. Lembahnya yang sangat terkenal adalah Ngarai Sianok dengan kedalaman 100m dan kemiringan antara 800-900 adalah salah satu daya tarik kota Bukittinggi dijadikan sebagai kota wisata.

Kota Bukittinggi memiliki nama lain yaitu Tri Arga yang artinya tiga pegunungan agung yang memberikan keberuntungan. Keagungan Gunung Merapi, Gunung Singgalang dan Gunung Sago pun ikut menghiasi moleknya kota Jam Gadang ini. Kota Bukittinggi adalah sebuah kota yang terletak di bagian utara Provinsi Sumatera Barat.

Kota ini memiliki topografi berbukit-bukit dan berlembah, beberapa bukit tersebut tersebar dalam wilayah perkotaan, di antaranya Bukit Ambacang, Bukit Tambun Tulang, Bukit Mandiangin, Bukit Campago, Bukit Kubangkabau, Bukit Pinang Nan Sabatang, Bukit Cangang, Bukit Paninjauan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat lembah yang dikenal dengan Ngarai Sianok dengan kedalaman yang bervariasi antara 75-110 m, yang di dasarnya mengalir sebuah sungai yang disebut dengan Batang Masang.

Gambar 2.1. Peta Kota Bukittinggi.



Luas wilayah Kota Bukittinggi adalah 25,24 km² dengan perincian luas per kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1.	Mandiingin Koto Selayan (MKS)	12,156	48
2.	Guguk Panjang (GP)	6,831	27,06
3.	Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB)	6,252	24,77
Jumlah		25,24	100

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi Tahun 2021.

C. Visi dan Misi Kota Bukittinggi

VISI

"Menciptakan Bukittinggi Hebat, Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah"

MISI

- 1) "HEBAT" Dalam Sektor Ekonomi Kerakyatan.
- 2) "HEBAT" Dalam Sektor Pendidikan.
- 3) "HEBAT" Dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan.
- 4) "HEBAT" Dalam Sektor Kepariwisataaan, Seni Budaya dan Olahraga.
- 5) "HEBAT" Dalam Tata Kelola Pemerintahan.
- 6) "HEBAT" Dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan.
- 7) "HEBAT" Dalam Sektor Bidang Pertanian.

Humanis; Enterpreneur; Bijak; Agamais/Adil; Tauladan

BAB III

STRUKTUR KEPENDUDUKAN

Data kependudukan salah satunya digunakan untuk melihat tren dinamika penduduk sebagai monitoring dan evaluasi program pembangunan.

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang melakukan dan melaksanakan pembangunan sekaligus merupakan objek atau sasaran pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus komponen output dalam pembangunan. Oleh karena itu pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

A. Penduduk Menurut Jenis kelamin

Dinamika penduduk dapat dilihat dari perubahan struktur dan komposisinya menurut umur dan jenis kelamin. Proyeksi penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebesar 121.588 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan disajikan melalui angka rasio jenis kelamin (*sex ratio*). *Sex Ratio* penduduk Kota Bukittinggi sebesar 100 %. Artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 100 penduduk laki-laki. Angka *sex ratio* 100 ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan sama banyak dengan penduduk laki-laki.

Distribusi penduduk Kota Bukittinggi menurut jenis kelamin tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2021.

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH PENDUDUK			
		LAKI-LAKI	PEREM-PUAN	LAKI-LAKI + PEREM-PUAN	RASIO JENIS KELAMIN
1	0 – 4	5.506	5.207	10.713	105,7
2	5 – 9	5.103	4.912	10.015	103,9
3	10 – 14	5.249	4.920	10.169	106,7
4	15 – 19	5.079	4.804	9.883	105,7
5	20 – 24	5.061	5.169	10.230	97,9
6	25 – 29	5.375	5.395	10.770	99,6
7	30 – 34	4.999	4.930	9.929	101,4
8	35 – 39	4.508	4.465	8.973	101,0
9	40 – 44	4.136	4.067	8.203	101,7
10	45 – 49	3.900	3.911	7.811	99,7
11	50 – 54	3.330	3.493	6.823	95,3
12	55 – 59	2.952	2.931	5.883	100,7
13	60 – 64	2.248	2.269	4.517	99,1
14	65 – 69	1.566	1.691	3.257	92,6
15	70 – 74	895	1.146	2.041	78,1
16	75+	909	1.462	2.371	62,2
JUMLAH		60.816	60.772	121.588	100,07

Sumber: BPS Kota Bukittinggi.2022

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa menurut kelompok usia terdapat beberapa kecenderungan, diantaranya penduduk lansia (> 60 tahun) perempuan (6568 jiwa) lebih banyak dibandingkan dengan penduduk lansia (> 60 tahun) laki-laki 5618 jiwa. Hal ini menunjukkan umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki.

Bila pembahasan difokuskan kepada perempuan terlihat bahwa perempuan usia 15 sampai dengan 49 tahun sebanyak 32.741 jiwa (26,93 % dari jumlah seluruh penduduk Bukittinggi). Ini berarti secara biologis adalah usia reproduksi yang akan berpotensi menjalani proses hamil dan melahirkan. Lebih dari seperempat penduduk perempuan ini perlu mendapatkan perhatian serius karena berkaitan dengan kelangsungan generasi yang akan lahir, perhatian yang sangat dibutuhkan berupa kesehatan dan status gizi yang optimal serta perlunya dibekali dengan pengetahuan tentang pola asuh yang sesuai dengan tumbuh kembang anak.

B. Penduduk Produktif / Beban Ketergantungan

Komposisi penduduk menurut kelompok umur produktif digolongkan menjadi tiga, yaitu produktif (15- 64 tahun), belum produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Penduduk belum produktif disebut juga dengan angka ketergantungan muda, sedangkan tidak produktif lagi disebut dengan angka ketergantungan tua.

Angka Beban Ketergantungan Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Angka beban ketergantungan yang kecil akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif (kelompok umur 15-64 tahun) untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Tabel 3.2. Persentase Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan, Kota Bukittinggi 2018-2021

Tahun	0 - 14 Tahun	15 - 64 Tahun	65 Tahun+	Angka Beban Ketergantungan (%)
2018	27,19	67,96	4,85	47,14
2019	26,98	68,01	5,00	47,03
2020	26,74	68,08	5,18	46,88
2021	25,41	68,28	6,30	46,45

Catatan : *menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk tahun 2010 - 2035
Sumber : BPS Kota Bukittinggi

Angka beban ketergantungan yang tinggi menunjukkan bahwa penduduk usia produktif menghadapi beban yang lebih besar untuk mendukung dan memberikan layanan sosial yang dibutuhkan oleh penduduk tidak produktif (14 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas) yang sering tergantung secara ekonomi.

Dependensi rasio Kota Bukittinggi adalah 46,45 yang berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 47 orang penduduk usia tidak produktif. Bila dilihat berdasarkan gender, maka penduduk perempuan yang produktif hampir sama banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang produktif.

Jika dilihat dari sisi ekonomi maka kelompok usia 15 sampai 64 tahun terdapat 41.434 jiwa penduduk perempuan yang masuk usia perempuan produktif. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan perempuan tersebut serta mendukung ekonomi keluarganya. Untuk itu bagi perempuan yang belum bekerja perlu mendapatkan pembinaan dan pembekalan keterampilan untuk berusaha. Angkatan kerja perempuan akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan apabila jumlah angka tersebut memenuhi persyaratan, **Pertama jumlah penduduk perempuan yang terjun kepasar kerja (angkatan kerja) harus optimal. Angka ketergantungan tidak terlalu tinggi artinya jumlah penduduk tidak produktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif tidak terlalu tinggi.**

Angka ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin rendah angka *dependency ratio* maka peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi. Rendahnya angka ketergantungan menunjukkan tingginya proporsi penduduk usia produktif relatif terhadap penduduk usia belum/tidak produktif. Sehingga secara ekonomi akan semakin besar peluang untuk menghasilkan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin rendahnya *dependency ratio* juga menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi sehingga nilai tambah perkapita akan semakin tinggi, hal ini berarti peningkatan kesejahteraan penduduk.

Pada tabel diatas terlihat, angka ketergantungan usia muda lebih besar dari pada angka ketergantungan usia tua, hal ini akan berdampak kepada fasilitas sosial dan ekonomi yang mesti dipersiapkan , seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, ekonomi dan fasilitas lainnya yang mendukung terhadap pembentukan generasi muda yang berkualitas. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, perempuan memiliki tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dari pada laki-laki, oleh sebab itu prioritas pembangunan hendaklah lebih memprioritaskan kepada perempuan.

Jumlah golongan penduduk usia tua (75+) juga cukup besar, terutama perempuan. Hal ini dapat dimaknai dengan semakin tingginya usia harapan hidup, terutama perempuan. Kondisi ini menuntut kebijakan terhadap penduduk usia tua. Bertambahnya jumlah penduduk tua dapat dimaknai sebagai meningkatnya tingkat kesejahteraan, meningkatnya kondisi kesehatan tetapi juga dapat dimaknai sebagai beban karena kelompok usia tua ini sudah tidak produktif lagi.

C. Penyebaran Penduduk

Konsentrasi penduduk di suatu wilayah dapat di pelajari dengan menggunakan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk.

Tabel 3.3. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi, 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Laju Pertumbuhan Penduduk
1.	Guguk Panjang	6.831	41.226	33,91	6.035	-0,4
2.	Mandiangan Koto Selayan	12.156	53.679	44,15	4416	1,21
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	6.252	6,252	26.683	2194	4268
Hasil Registrasi		25.239	121.588	100	4817	0,46

Sumber: BPS Kota Bukittinggi.2022

Penyebaran penduduk Kota Bukittinggi paling banyak adalah di kecamatan Mandiangan Koto Selayan yaitu 53.679 jiwa (44,15%) dan paling sedikit di kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh yaitu 26.683 jiwa (21,94%).

Namun Kecamatan dengan tingkat kepadatan yang paling tinggi yaitu kecamatan Guguk Panjang yaitu 6 035 jiwa per km², diikuti oleh kecamatan Mandiangan Koto Selayan sebanyak 4.416 jiwa per km² dan kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 2194 jiwa per km².

Ditinjau dari penyebaran penduduk berdasarkan luas daerah, kepadatan penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2021 sudah tergolong sangat padat, yaitu 4 817 jiwa per km². Berarti tiap km² terhuni oleh penduduk sebanyak 4.817 jiwa. Kepadatan penduduk pada tahun 2021 meningkat sebanyak 22 jiwa dibandingkan dengan penyebaran penduduk pada tahun 2020 sebesar 4.795 per km².

Berdasarkan klasifikasi kepadatan penduduk menurut kabupaten dan kota menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Kota Bukittinggi termasuk klasifikasi sangat padat dan merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi dibandingkan dengan 18 kabupaten/kota lain di Propinsi Sumatera Barat. Kepadatan penduduk kota Bukittinggi yang demikian disebabkan salah satunya karena wilayah Kota Bukittinggi sendiri hanya mencakup 0.06% saja dari total luas Propinsi Sumatera Barat disamping berkembangnya kota Bukittinggi sebagai kota wisata dan kota pendidikan di Sumatera Barat.

Dari Laju pertumbuhan penduduk tahun 2021 secara proyeksi terdapat laju sebesar 0,46%, terlihat bahwa terjadi penurunan dari tahun 2020 yaitu sebesar 0,35 %.

D. Komposisi Penduduk Menurut Wajib KTP

Seluruh penduduk yang telah berusia 17 tahun ke atas wajib memiliki identitas kewarganegaraan atau yang dikenal dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti dari yang diterbitkan oleh Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada tahun 2020 di Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa 99,95 % penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP Elektronik, Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya partisipasi dalam pengurusan KTP.

Tabel. 3.4. Jumlah Penduduk Yang Wajib Memiliki KTP dan Telah Memiliki KTP Elektronik Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2021.

NO	Kecamatan	Penduduk	Wajib KTP	Memiliki KTP Elektronik	%
1	Guguk Panjang	41.226	32.238	32.217	99,93
2	Mandiingin Koto Selayan	53.679	38.961	38.936	99,94
3	Aur Birugo Tigo Baleh	6,252	19.647	19.637	99,95
Jumlah		121.588	90.846	90.790	99,94

Sumber: Disdukcapil Kota Bukittinggi Tahun 2022

Bila dilihat perkembangan kepemilikan KTP Elektronik tahun 2021 terlihat peningkatan dibanding tahun 2019 yaitu dari 99,8 % dan meningkat menjadi 99,95 % ditahun 2020.

E. Kepemilikan Akte Kelahiran untuk Anak

Hak Sipil anak adalah hak asasi yang melekat pada pribadi seseorang (anak) sebagai seorang individu unik ditengah masyarakat sehingga ia bisa mengembangkan kemampuan dan kepribadiannya secara leluasa termasuk hak identitas anak. Sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 5, yaitu “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan” dan pasal 27 ayat 1 yaitu “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya,” ayat 2 identitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akte kelahiran. Lebih lanjut Akte Kelahiran tersebut merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap warga negaranya.

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, *Anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Salah satu hak sipil anak adalah mendapatkan akte kelahiran seperti yang tercantum dalam pasal 5 bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Dari penduduk usia 0-18 tahun, yang telah memiliki akte kelahiran di Kota Bukittinggi sekitar 93,79%, yang terdiri dari 45,4% anak perempuan dan 48,3% anak laki- laki-, seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5. Presentase Anak Usia 0-18 tahun yang Memiliki Akte Kelahiran menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2021.

No.	Kecamatan	Jml Penduduk 0-18 Th			Akte Kelahiran			%
		Laki-laki	Perempuan	Jmlh	Laki-laki	Perempuan	Jmlh	
1.	Guguk Panjang	7712	7194	14906	7296	6833	14129	94,78
2.	Mandiangan Koto Selayan	9393	8883	18276	8874	8480	17354	94,95
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	5025	4608	9633	4751	4393	9144	94,92
Jumlah		22130	20685	42815	20921	19706	40627	94,89

Sumber :Disdukcapri Kota Bukittinggi Tahun 2021

Sedangkan penduduk yang belum memiliki Akte Kelahiran masih terdapat sebanyak 5,11 % atau 2.188 orang.

F. Laju Pertumbuhan Penduduk

Dibawah ini dapat dilihat laju pertumbuhan penduduk sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 3.6. Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021

Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk
2017	1,68
2018	1,56
2019	1,55
2020	0,81
2021	0,46

Sumber : BPS Tahun 2022

Dari tabel diatas terlihat penurunan laju pertumbuhan penduduk di Kota Bukittinggi, hal ini menggambarkan adanya kebersihan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Bukittinggi.

Adapun upaya yang dilakukan Dinas P3APPKB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk antara lain meliputi hal-hal berikut :

1. Memfasilitasi alat dan obat Kontrasepsi secara gratis.
2. Melakukan pelayanan berkala di fasilitas kesehatan dan pelayanan serentak yang dikerjaksamakan dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan penyuluh lapangan KB (IpeKB), TNI,TP,PKK.
3. Menyediakan biaya layanan kegagalan program KB.
4. Memberikan testimoni kepada calon akseptor oleh akseptor sukses.
5. Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui berbagai model seperti KIE perorangan, KIE Kelompok, KIE Media Masa dan KIE Melalui mobil penerangan KB (MUPEN).
6. Memfasilitasi KIE KIT untuk kader, kelompok kegiatan dan Generasi Berencana (GenRe) KIT untuk pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) jalur pendidikan dan masyarakat.

7. Mengkampanyekan hindari 4 T melalui berbagai penyuluhan yaitu:
 - Tidak melahirkan terlalu muda,
 - Tidak melahirkan terlalu tua
 - Tidak melahirkan terlalu banyak
 - Tidak melahirkan terlalu rapat
8. Mengembangkan program Ketahanan Remaja melalui kegiatan PIK R jalur pendidikan dan jalur masyarakat dengan konsentrasi program:
 - Tidak menikah diusia dini
 - Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja
 - Memberikan pemahaman Triad Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
9. Mengembangkan kelompok kegiatan (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
10. Menggerakkan Program KB.
11. Membentuk dan Mensosialisasikan Sekolah Siaga Kependudukan di tingkat SLTP dan SLTA se Kota Bukittinggi.

G. Komposisi Penduduk menurut Status Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah suatu ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara tidak langsung status perkawinan akan mempengaruhi tingkat kelahiran. Umumnya suatu daerah dengan proporsi kawin yang tinggi cenderung menaikkan angka kelahiran.

Tabel 3.7. Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Status Perkawinan Hasil Pendataan Keluarga di Kota Bukittinggi Tahun 2021.

No	Kecamatan	Jml Kepala Keluarga	Belum kawin		Kawin		Janda/ Duda	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.	Guguk Panjang	8.521	132	1,55	6.672	78,30	1.717	20,15
2.	Mandiingin K.Selayan	10.542	120	1,14	8.645	82	1.777	16,85
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	5.745	40	0,69	4.862	84,63	843	14,67
4.	Bukittinggi	24.808	292	1,18	20.179	81,34	4337	17,48

Sumber: Pendataan Keluarga/PBDKI Dinas P3APPKB Tahun 2022.

Tabel diatas menggambarkan bahwa 81,34 % dari kepala keluarga yang berstatus kawin, selain dari itu berstatus belum kawin dan janda /duda.

H. Kepala Keluarga Perempuan

Kepala Keluarga tidak hanya berjenis kelamin laki-laki saja tetapi perempuan pun ada yang berperan sebagai kepala keluarga. Peran kepala keluarga sangatlah besar dalam mengambil keputusan dalam sebuah keluarga, seperti memilihkan pendidikan untuk anak-anak, menjaga kesehatan keluarga, sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan suatu daerah.

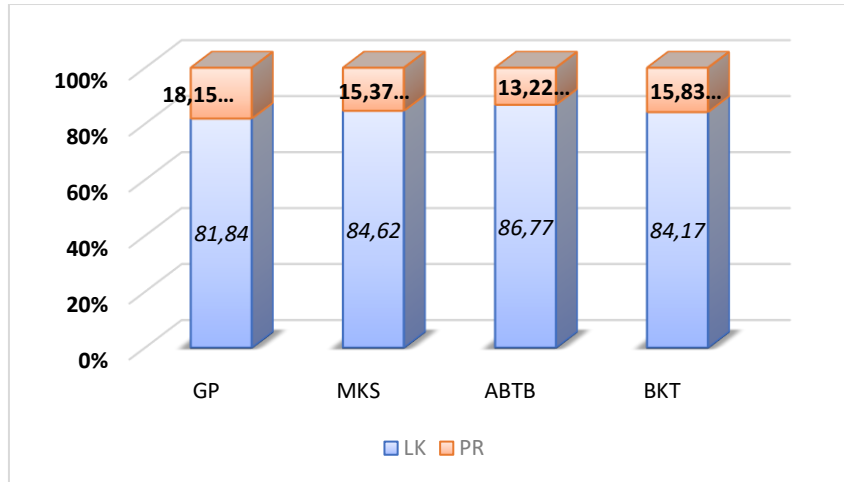
Tabel 3.8. Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2021

No	Kecamatan	Jml Kepala Keluarga	Laki laki		Perempuan	
			Jml	%	Jml	%
1	Guguk Panjang	8521	6974	81,845	1547	18,155
2	Mandiingin Koto Selayan	10542	8921	84,623	1621	15,377
3	Aur Birugo Tigo Baleh	5745	4985	86,771	760	13,229
4	Bukittinggi	24808	20880	84,166	3928	15,834

Sumber: Pendataan Keluarga/PBDKI

Di bawah ini memperlihatkan persentase Kepala rumah tangga menurut jenis kelamin tahun 2021.

Gambar 3.2. Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2021



Sumber: Pendataan Keluarga/PBDKI

Tabel di atas menggambarkan bahwa terdapat 4212 orang atau 16,20% kepala keluarga di Kota Bukittinggi adalah perempuan, hal ini berarti perempuan haruslah memiliki kemampuan baik secara ekonomi, moral dan spiritual untuk menjadi pengambil keputusan di rumah tangganya.

BAB IV

PENGARUSUTAMAAN GENDER

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Pengarusutamaan Gender (PUG) bukanlah suatu program atau kegiatan melainkan suatu strategi pembangunan untuk mencapai suatu keadilan dan kesetaraan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang PUG Dalam Pembangunan Nasional.

Tujuh prasyarat PUG dalam mengimplementasikan PUG pertama adalah :

1. Komitmen yang tinggi oleh para pimpinan dan seluruh pegawai,
2. Kelembagaan PUG yang bertanggung jawab,
3. SDM karena sangat diperlukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pemerataan pemahaman terkait PUG
4. Anggaran karena rencana tidak akan bisa berjalan tanpa adanya anggaran,
5. Gender Analisis,
6. Data terpilah
7. Peran masyarakat.

A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

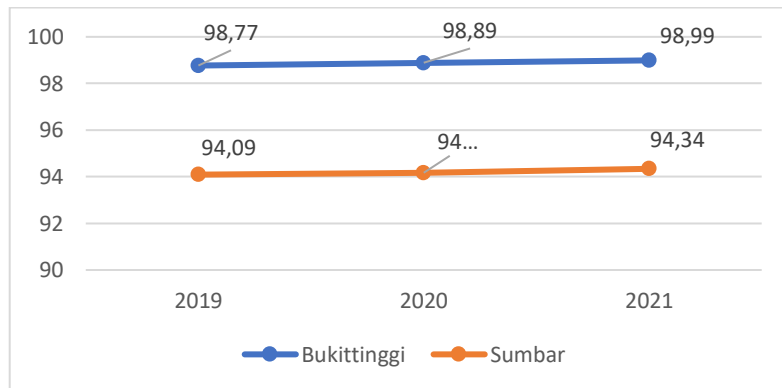
IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung *Gender Development Index* (GDI) dan *Human Development Indeks* (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia.

Kegunaan dari IPG adalah untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan.

Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), (ii) Pengetahuan (*knowledge*), dan (iii) Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bukittinggi pada 3 tahun terakhir , lebih tinggi dari IPG Sumatera Barat, seperti terlihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 4.1 Indeks Pembangunan Gender Kota Bukittinggi Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021.



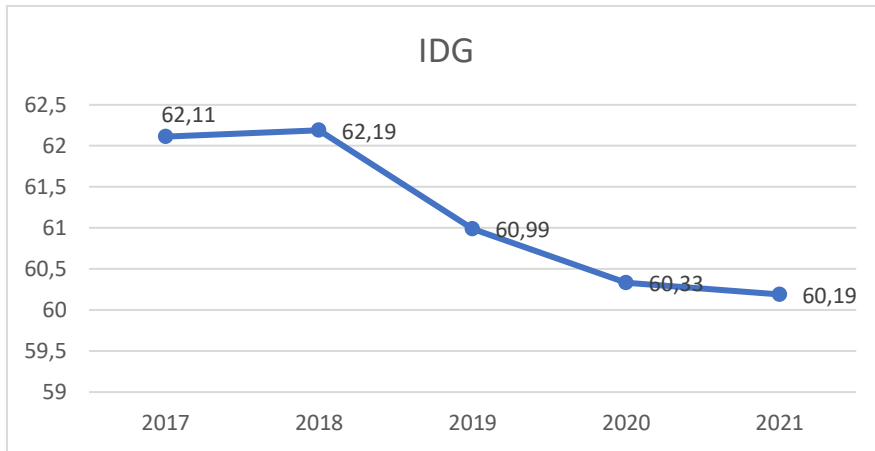
Sumber : BPS Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2022

B. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi dengan indikator keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan.

Berdasarkan data Statistik, IDG Kota Bukittinggi sejak tahun 2017 masih belum menggembirakan, karena dibandingkan dengan kabupaten Kota lain yang ada di Propinsi Sumatera Barat, Bukittinggi masih belum bisa mengungguli, seperti terlihat pada grafik 3.2 berikut;

Gambar 4.2 Grafik Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bukittinggi Tahun 2017 sampai 2021



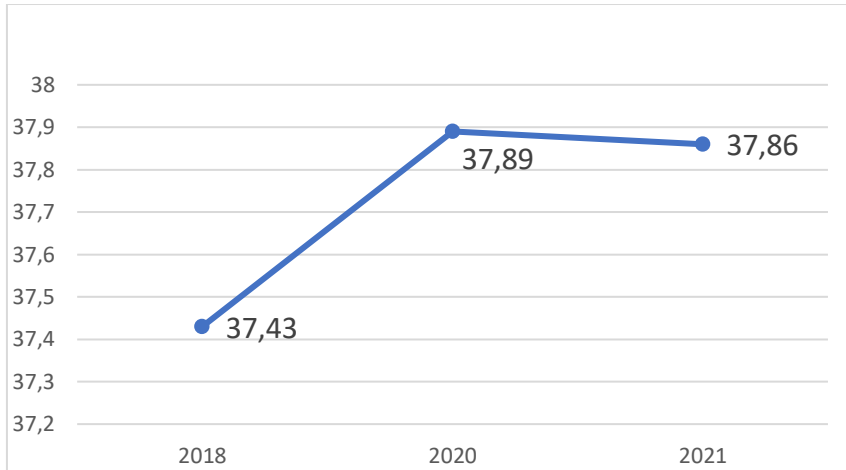
Sumber ; BPS Sumatera Barat dalam Angka 2022

Dari grafik diatas terlihat bahwa IDG Kota Bukittinggi mengalami penurunan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, Penurunan ini disebabkan karena masih rendahnya peran aktif wanita di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi, hal ini bisa dilihat dengan indikator keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan.

C. Sumbangan Pendapatan Perempuan

Sumbangan Pendapatan Perempuan Kota Bukittinggi Tahun 2021 adalah 37,86 %, sedikit menurun dari tahun 2020. Seperti terlihat pada gambar 4.3 dibawah ini.

Gambar 4.3. Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan Kota Bukittinggi Tahun 2018 sd 2021.



Sumber ; BPS Sumatera Barat dalam Angka 2022

Sumbangan pendapatan perempuan di Kota Bukittinggi adalah 37,86 persen sementara laki-laki 62,14 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa perempuan belum banyak berperan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga. Ditambah lagi dengan angka kekerasan pada anak yang sering terjadi, tak pelak akan memunculkan perempuan rumah tangga rentan terhadap berbagai masalah sosial kemiskinan. Para perempuan kepala rumah tangga inilah yang perlu diberdayakan dalam peran dan kualitas hidupnya yang berujung pada penguatan ketahanan keluarga.

D. Perempuan sebagai tenaga Profesional

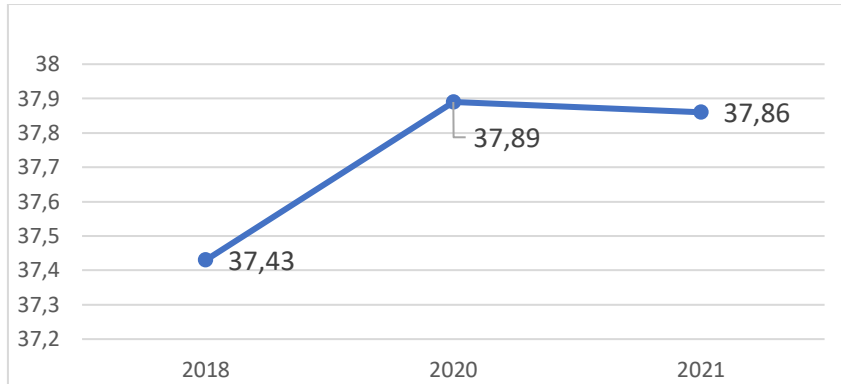
Indikator lain yang juga digunakan dalam mengukur indeks komposit IDG yaitu persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, kepemimpinan, dan teknisi. Indikator ini menunjukkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan ekonomi dan sosial. Keterlibatan perempuan di posisi ini memberikan gambaran kemajuan terhadap peranan perempuan, mengingat selama ini perempuan hanya dipandang sebagai

mahluk berurusan dengan pekerjaan rumah tangga. Padahal perempuan memiliki potensi yang sama baiknya dengan laki-laki, hanya perempuan kurang memiliki kesempatan karena terbentur oleh persoalan budaya serta kodrat yang melekat terkait dengan fungsi-fungsi reproduksi (Parawansa, 2003).

Hanya sayangnya, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, swasta, dan organisasi sosial lainnya sangat kecil, mengingat masih terbatasnya perempuan sebagai tenaga profesional, kepemimpinan/managerial, administrasi, serta teknisi. Tak jauh berbeda dengan komponen sebelumnya, komponen ini juga masih menunjukkan bahwa capaian perempuan lebih rendah dari laki-laki. Persentase perempuan sebagai tenaga profesional pada 2021 mengalami penurunan setelah tahun lalu sempat meningkat. Capaian tahun 2021 sebesar 37,86 persen, menurun sebesar 0,03 persen dari capaian 2020.

Meningkatnya persentase perempuan dibanding tiga tahun sebelumnya sebagai tenaga profesional menandakan bahwa keterlibatan perempuan dalam mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam perekonomian semakin bisa disejajarkan dengan laki-laki.

Gambar 4.4. Perempuan sebagai tenaga Profesional Kota Bukittinggi tahun 2018 sampai dengan tahun 2021



Sumber : BPS Sumatera Barat dalam Angka 2022

E. Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, kaum perempuan yang duduk di Parlemen masih 2 orang atau 8 % dari anggota DPRD Kota Bukittinggi.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kapabilitas penduduknya masih meninggalkan persoalan yaitu masih terjadinya ketimpangan aksesibilitas antara laki-laki perempuan. Pada uraian sebelumnya telah dipaparkan bahwa pencapaian perempuan dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan relatif masih tertinggal dari pencapaian laki-laki. Ketimpangan ini ternyata terjadi pula dalam bidang politik. Keterwakilan perempuan dalam parlemen masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 8 persen. Nilai ini masih dibawah kuota yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa kuota perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam politik sekitar 30 persen. Apabila kuota perempuan yang telah diatur dalam UU tersebut mampu dicapai secara optimal, tentu akan membawa dampak yang positif dalam pemberdayaan perempuan mengingat kebijakan-kebijakan yang dibuat akan lebih memperhatikan isuisu gender.

BAB V

DATA GENDER DAN ANAK BIDANG PENDIDIKAN

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. SDM yang berkualitas salah satunya dapat diukur dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pendidikan formal dititikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi. Demikian juga peningkatan ketersediaan informasi pendidikan, pengembangan budaya baca, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, khususnya bagi perempuan dan anak. Sementara pendidikan non formal bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat dalam mencapai program wajib belajar 9 tahun.

Indikator pendidikan seperti angka melek huruf, status pendidikan ,rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi perempuan dan anak. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata lama sekolah bagi perempuan akan berdampak kepada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan bangsa. Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas yang baik tanpa membedakan anak laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan penduduk laki-laki akan sangat potensial apabila diberdaya gunakan. Tanpa mengenyampingkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan yang bertanggung jawab terhadap keluarga, maka peran perempuan untuk

menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak-anak. Ibu yang berpendidikan diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas.

Bagaimana peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan serta sampai seberapa jauh pendidikan telah diakses oleh perempuan akan diulas pada bab ini. Data dan informasi yang dihasilkan diharapkan akan dapat mengidentifikasi sebagian besar profil perempuan dan anak di bidang pendidikan dalam membantu pengambil keputusan untuk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Gambaran mengenai pendidikan pada bab ini antara lain mencakup Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan, angka buta huruf, angka putus sekolah dan akses internet.

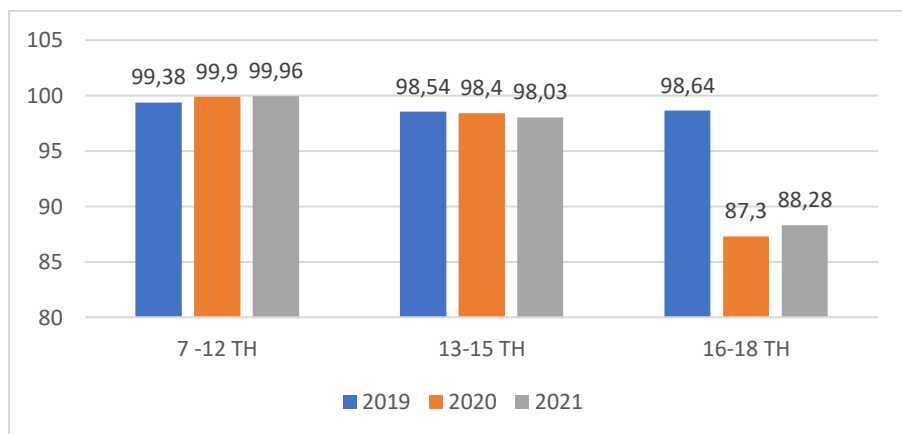
A. Angka Partisipasi Sekolah

Salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang sampai dengan tahun 2030, baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian SDGs adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Berdasarkan data Susenas, terjadi kenaikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok umur 7-12 dan 16-18 setiap tahunnya sejak tahun 2019 sampai 2021. APS pada kelompok umur 7-12 pada tahun 2021 sebesar 99,96 persen menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan semakin meluas dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga penduduk Kota Bukittinggi usia 7-12 tahun yang belum mengenyam pendidikan atau tidak

bersekolah sudah jarang. APS pada kelompok usia 13-15 tahun cukup besar bila dibandingkan dengan kelompok umur 7-12 yaitu sebesar 1,97 persen penduduk yang sedang tidak bersekolah pada tahun 2021. Ditahun yang sama, pada kelompok umur 16-18 persentase penduduk Kota Bukittinggi yang sedang tidak bersekolah mencapai 11,72 persen.

Gambar 5.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur di Kota Bukittinggi, 2019-2021



Sumber : Kota Bukittinggi Dalam Angka 2021, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bukittinggi 2021

Pada kelompok umur 7-12 tahun, APS Kota Bukittinggi tahun 2021 diatas capaian APS provinsi yang sebesar 99,61 persen. Sedangkan pada kelompok umur 13-15 tahun, APS Kota Bukittinggi tahun 2021 juga berhasil melebihi capaian APS provinsi yang sebesar 96,63 persen. Hal yang sama berlaku untuk penduduk usia 16-18 tahun, APS Kota Bukittinggi juga berhasil melebihi APS Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 84,07 persen.

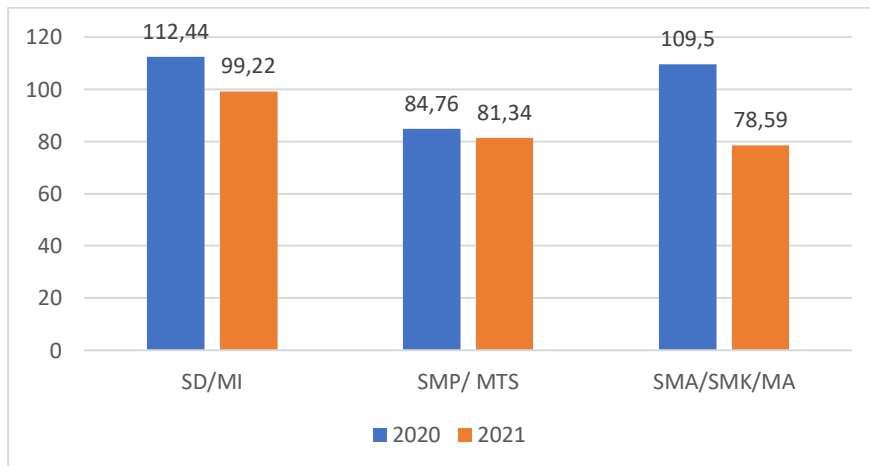
Tingginya Partisipasi Sekolah Kota Bukittinggi disebabkan karena tingginya akses pendidikan untuk penduduk usia sekolah , sehingga kesempatan dalam mengenyam pendidikan semakin besar.

B. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan.

Gambar 5.2. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang Pendidikan di Bukittinggi Tahun 2020 dan 2021



Sumber: Kota Bukittinggi Dalam Angka 2021, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bukittinggi 2022

Dari gambar di atas terlihat bahwa APK siswa SD /MI mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yaitu 99,22 %. Hal ini

mengindikasikan populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar mencakup anak diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibandingkan usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah diusia yang lebih muda. Faktor lain yang menyebabkan APK tahun 2020 melebihi 100% adalah adanya siswa yang berasal dari luar Kota Bukittinggi yang bersekolah di Bukittinggi.

Salah satu penyebab tingginya APK di Kota Bukittinggi adalah karena peminatan dan daya tampung pendidikan di Kota Bukittinggi lebih besar, sebab Bukittinggi merupakan kota pendidikan yang memiliki fasilitas pendidikan dan mutu yang cukup baik di Sumatera Barat.

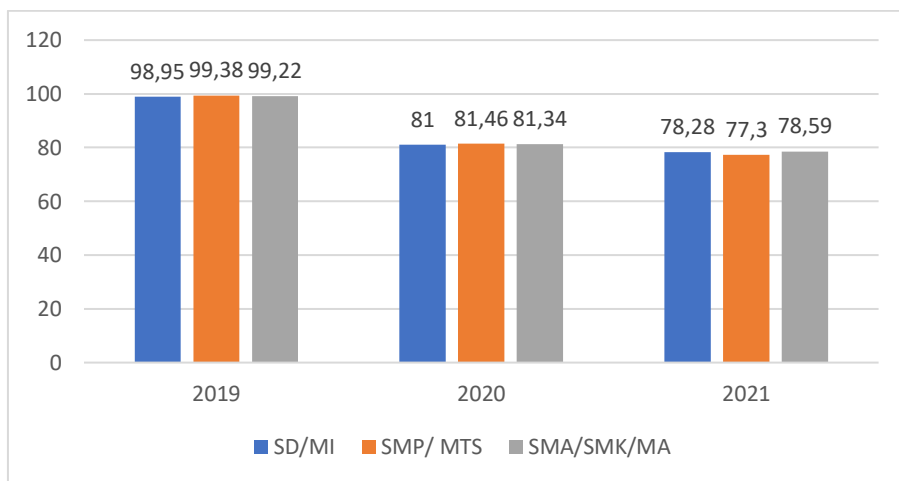
C. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu (7 sampai dengan 18 tahun) yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat

bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Gambar berikut menunjukkan Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan di Kota Bukittinggi Tahun 2019, 2020 dan 2021.

Gambar 5.3. Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan di Kota Bukittinggi Tahun 2019 sampai 2021.



Sumber : Kota Bukittinggi Dalam Angka 2021, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bukittinggi 2022

Secara umum APM SD dari tahun 2019 ke 2020 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan. APM pada tahun 2021 yaitu sebesar 99,22 turun dari tahun 2020 sebesar 99,38 persen.

Pada gambar diatas terlihat bahwa APM terendah pada jenjang pendidikan SMA / SMK/ MA. Hal ini menggambarkan bahwa pada jenjang pendidikan tersebut masih terdapat anak yang sekolah tidak tepat waktu, terlalu cepat atau terlalu lambat masuk SMA /SMK / MA..

D. Melek Huruf dan Buta Huruf

Kegiatan membaca merupakan proses awal memasuki dunia pengetahuan yang begitu luas menuju masyarakat maju. Membaca akan mempermudah seseorang untuk memahami informasi terkait bidang kerja dan berbagai aspek yang menyangkut peningkatan kualitas hidup. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuan hidupnya. Hal ini berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Salah satu indikator mendasar yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis adalah angka melek huruf (*literacy rate*). Kata “melek huruf” dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca tulis. AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia suatu daerah.

Persentase penduduk Kota Bukittinggi berumur 19 tahun ke atas yang melek huruf menurut jenis kelamin tahun 2021 adalah 99,71, laki-laki sebesar 99,5 % dan perempuan 100%. Hal ini menunjukkan pencapaian pendidikan dasar yang efektif dan berhasilnya program keaksaraan, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1. Persentase Penduduk Berumur 15 tahun keatas yang Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2019 sampai 2021

No	Jenis Kelamin	2019	2020	2021
1	Laki-laki	99,46	99,91	99,5
2	Perempuan	99,69	100	100
	Bukittinggi	99,58	99,96	99,71

Sumber Data : BPS Tahun 2022

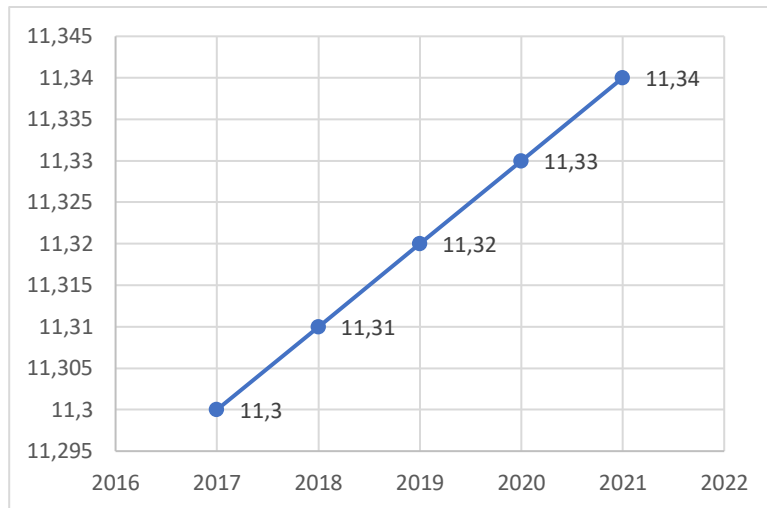
Penduduk usia 15 tahun keatas merupakan masyarakat dewasa yang sudah seharusnya dapat membaca dan menulis huruf latin. Namun pada kenyataannya pada tahun 2021 masih ada sekitar 0,29 persen penduduk Kota Bukittinggi usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat sekitar satu orang yang buta huruf. AMH penduduk di Kota Bukittinggi berfluktuasi dari tahun 2019 sampai 2021. Peningkatan terjadi dari 99,58 persen pada tahun 2019 menjadi 99,96 persen pada tahun 2020, kemudian turun menjadi 99,71 persen pada tahun 2021. Namun, pencapaian AMH tersebut masih menunjukkan bahwa angka buta huruf Kota Bukittinggi tercatat sudah di bawah 1 persen

E. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata -rata lama sekolah sangat penting karena digunakan

sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya pada dimensi pendidikan.

Gambar 5.4. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kota Bukittinggi, 2017-2021



Sumber : Kota Bukittinggi Dalam Angka 2020, IPM 2021

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk Propinsi Sumatera Barat adalah 8,92 tahun, sedangkan untuk Kota Bukittinggi, rata-rata lama sekolah 11,34 (tahun 2021). Ini berarti penduduk Bukittinggi sudah menuntaskan wajib belajar 9 tahun.

Rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kota Bukittinggi terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, rata-rata lama sekolah Kota Bukittinggi sebesar 11,30 tahun, angka tersebut meningkat hingga tahun 2021 mencapai 11,34 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa seorang anak mampu menempuh pendidikan selama 11-12 tahun atau setara kelas dua SMA, yang berarti rata-rata penduduk di Kota Bukittinggi dapat menamatkan sekolah hingga jenjang SMP sehingga pemerintah Kota Bukittinggi telah berhasil melaksanakan program wajib belajar 9 tahun.

F. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/ keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, maka tamatan pendidikan tinggi diharapkan akan meningkatkan produktivitasnya sebagai tenaga kerja. Selanjutnya, peningkatan produktivitas seseorang dalam bekerja diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Karena pentingnya pendidikan tersebut, maka pemerintah mewajibkan semua warga negara Indonesia untuk menyelesaikan pendidikan dasar dengan program wajib belajar 9 tahun (6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP).

Indikator yang digunakan untuk memantau pencapaian program wajib belajar 9 tahun adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat pendidikan dasar. Gambaran mengenai pendidikan penduduk Kota Bukittinggi dapat terlihat dari Tabel 5.2 yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki pendidikan tertinggi SLTP ke atas sebesar 82,94 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Kota Bukittinggi masih dapat dikatakan sudah cukup baik. Artinya lebih dari tiga perempat penduduk Kota Bukittinggi yang berusia 15 tahun ke atas telah mengikuti program pemerintah, yaitu mencapai paling kurang tamat SLTP “Wajib Belajar 9 Tahun”. Penduduk Kota Bukittinggi paling banyak adalah lulusan SMA sederajat yaitu sebesar 42,02 persen dari penduduk berusia 15 tahun ke atas. Selanjutnya lulusan SMP sebesar 19,56 persen. Namun, masih ada sekitar 7,25 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD atau belum pernah sekolah.

Tabel 5.2. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/ STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi, 2021

No.	Ijazah/ STTB Tertinggi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
1	Tidak Punya Ijazah	7,67	6,88	7,25
2	SD /MI	11,06	8,66	9,81
3	MP/MTs	21,09	18,15	19,56
4	SMA/ MA	36,67	33,67	34,91
5	SMK/MAK	7,20	7,02	7,11
6	Diploma I/II	0,32	0,69	0,51
7	Akademi / Diploma III	3,59	6,93	5,33
8	D IV / S1/S2/S3	12,42	18,38	15,52
	SMP +	81,28	84,46	82,94

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera barat 2021

Jika dilihat menurut jenis kelamin, penduduk berusia 15 tahun ke atas berjenis kelamin perempuan relatif memiliki pendidikan lebih tinggi dibandingkan penduduk berjenis kelamin laki-laki. Masing-masing persentase penduduk usia 15 tahun ke atas berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang tamat SMP ke atas yaitu 81,28 persen dan 84,46 persen. Penduduk yang lulusan Sekolah Menengah lebih didominasi penduduk laki-laki. Namun, pada jenjang perguruan tinggi persentase penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki pada usia yang sama. Hal ini salah satunya dapat disebabkan oleh budaya laki-laki yang memiliki kecenderungan lebih memilih bekerja untuk membantu tanggungjawab ekonomi keluarga.

Tabel 5.3 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Keatas Yang Menggunakan Telepon Seluler(HP) Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin, 2020

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+ Perempuan
Kota Bukittinggi	95,13	95,46	95,3
SUMATERA BARAT	84,12	81,95	83,03

Sumber Data: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Prov. Sumbar, 2020

Seperti terlihat pada tabel 3.4, persentase penduduk usia 5 tahun keatas yang berjenis kelamin laki-laki lebih dominan menggunakan telepon seluler dibandingkan perempuan

Persentase penduduk usia 5 tahun keatas yang tertinggi berada pada Kota Bukittinggi sebesar 95,13 (laki-laki) dan 95,46 (perempuan). Ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk usia 5 tahun keatas telah menggunakan telepon seluler.

Tabel 5.4 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Keatas Yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler(HP) Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin, 2020

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+ Perempuan
Kota Bukittinggi	79,17	80,16	79,68

Sumber Data: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Prov. Sumbar, 2020

BAB VI

BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Guna mewujudkan keluarga bahagia sejahtera, pemerintah selalu berupaya memberikan perhatian terhadap kesejahteraan perempuan di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana. Kesehatan perempuan dapat diukur berdasarkan kualitas fisik perempuan melalui indikator angka harapan hidup dan angka Kematian Ibu, Angka Kesakitan (*morbidity rate*), juga bisa dilihat pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat.

Program Keluarga Berencana juga merupakan upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan perempuan dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Indikator yang digunakan meliputi status pemakaian alat/ cara KB, jenis-jenis alat ber KB yang digunakan dan jumlah anak lahir hidup. Sementara usia perkawinan pertama dapat mempengaruhi seseorang dalam status pemakaian alat / cara ber KB.

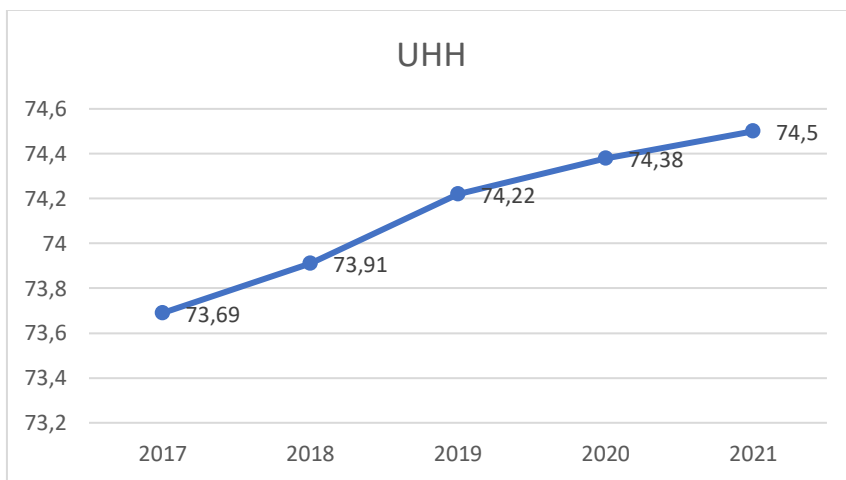
A. Angka Harapan Hidup

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Angka ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesehatan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka ini dipandang sebagai bentuk akhir dari upaya peningkatan derajat kesehatan sehingga dapat sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup merupakan gambaran rata-rata usia yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir.

Angka Harapan Hidup warga Bukittinggi selalu mengalami peningkatan hal ini merupakan dampak dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Penghitungan angka harapan hidup dengan menghitung rata-rata anak yang

dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Hal ini dikarenakan Indonesia belum memiliki sistem pendataan kematian berdasarkan kelompok umur. "Jadi angka harapan hidup berhubungan erat dengan angka kematian bayi. Jika angka kematian bayi tinggi, maka angka harapan hidupnya akan rendah. Begitu juga sebaliknya, angka kematian bayi rendah, angka harapan hidup tinggi. Gambar dibawah ini menunjukkan peningkatan Umur harapan Hidup penduduk Kota Bukittinggi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Gambar 6.1. Umur harapan Hidup Bukittinggi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021



Sumber : Diolah dari data BPS Kota Bukittinggi Tahun 2022

Gambar diatas memperlihatkan bahwa umur harapan hidup penduduk Kota Bukittinggi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

B. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

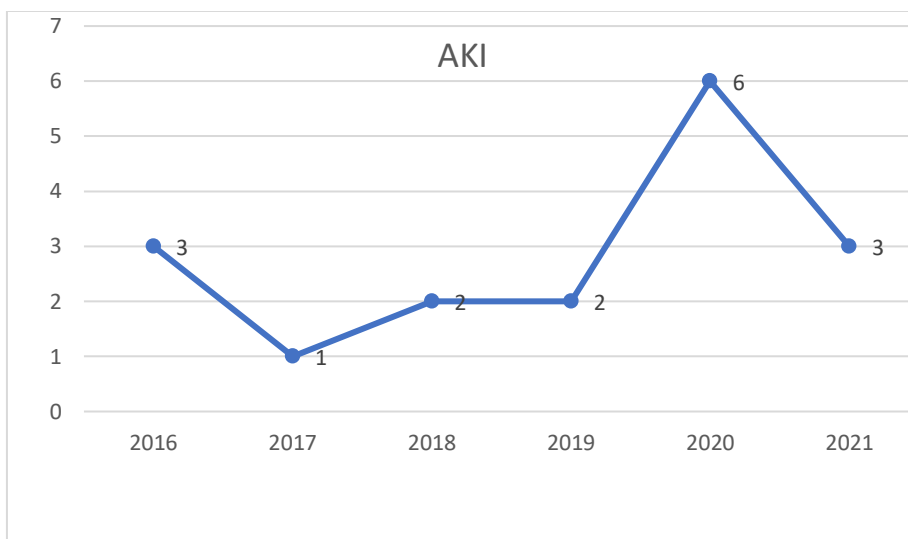
Angka kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Kematian ibu adalah kematian seorang wanita yang dikarenakan oleh kehamilan, persalinan, dan masa nifasnya. Angka kematian Ibu mencerminkan resiko yang dihadapi ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh:

- 1) Keadaan sosial ekonomi dan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan.
- 2) Kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran.
- 3) Tingkat tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetri.

AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Pada Gambar 5.1 berikut terlihat kecenderungan jumlah kematian ibu maternal sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 di Kota Bukittinggi.

Gambar 6.2. Jumlah Kematian Ibu di Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021



Sumber: Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bukittinggi Tahun 2022

Jumlah kematian ibu melahirkan di Kota Bukittinggi tahun 2021 adalah 3 jiwa. Kasus ini menurun dibandingkan kasus tahun sebelumnya. Upaya Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menurunkan Angka Kematian ibu salah satunya adalah meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Untuk itu pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan dengan meningkatkan jumlah dan kemampuan bidan di desa-desa, seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 telah ditetapkan dalam Keputusan Kemenkes No. HK.02.02/Menkes/52/2015 tahun 2015 yaitu meningkatkan jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan.

1. Penyebab Kematian Ibu

Dari 3 kasus kematian Ibu pada tahun 2021, penyebabnya adalah pendarahan, dan lain-lain, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1. Penyebab kematian Ibu Tahun 2021

No.	Kecamatan	Penda-rahan	Hipertensi dlm kehamilan	Infeksi	Ggn Sistem Peredaran Darah	Ggn. Metabolik	Lain - Lain
1	G.Panjang	0	0	0	0	0	1
2	MKS	0	0	0	0	0	1
3	ABTB	1	0	0	0	0	0
	JUMLAH	1	0	0	0	0	2

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2022

2. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Linakes) dengan Kompetensi Kebidanan

Periode persalinan merupakan salah satu periode yang berkontribusi besar terhadap Angka Kematian Ibu di Indonesia. Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa sekitar persalinan, hal ini disebabkan antara lain pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional).

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan yang bertujuan untuk mengamankan proses persalinan.

Tabel 6.2. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Pernah Melahirkan dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Kota Bukittinggi 2019 – 2021

Profesi	2019	2020	2021
Tenaga Kesehatan			
Dokter	58,72	55,25	42,7
Bidan	41,27	42,96	57,3
Lainnya	0	0	0
Bukan Tenaga Kesehatan			
Dukun Tradisional	0	0	0
Lainnya	0	1,79	0

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat (2019,2020,2021)

Usaha pemerintah Kota Bukittinggi dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik. Sebelum pandemi, terjadi peningkatan penggunaan jasa tenaga medis sebagai penolong persalinan. Namun pada tahun 2020, terjadi penurunan 1,79 persen dibanding tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa sebesar 1,79 persen perempuan melahirkan lebih memilih untuk tidak melibatkan tenaga kesehatan dalam proses kelahirannya, salah satu penyebabnya adalah ketakutan akan terpapar virus covid19. Kemudian pada tahun 2021 masyarakat kembali mempercayakan tenaga kesehatan dalam proses persalinannya.

3. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (*Antenatal Care*)

Ibu mempunyai peran yang sangat penting di dalam siklus pertumbuhan dan perkembangan anak, begitu juga dengan ibu hamil. Gangguan kesehatan yang dialami ibu hamil sangat berpengaruh terhadap kesehatan janin dalam kandungan, bahkan gangguan tersebut jika tidak cepat ditanggulangi, akan berlanjut sampai setelah ia lahir, masa balita dan remaja. Pelayanan antenatal (ANC) pada ibu hamil adalah

elayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan (Nakes) profesional (dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum, bidan dan perawat) kepada ibu hamil selama masa kehamilannya, yang mengikuti program pedoman pelayanan antenatal yang ada dengan titik berat pada kegiatan promotif dan preventif.

Hasil pencapaian upaya kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator Cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun.

Sedangkan Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan, dibandingkan sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ketenagakesehatan.

Cakupan pelayanan ante natal (K1 dan K4) di Kota Bukittinggi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.3. Cakupan Pelayanan *Antenatal Care* Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2021

No	Kecamatan	Sasaran	K1		K4	
			Jml	%	Jml	%
1	GP	693	642	92,64	587	84,70
2	ABTB	502	489	97,41	465	92,63
3	MKS	844	820	97,16	768	91,00
Jumlah		2039	1951	95,68	1820	89,26

Sumber: Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2022.

Dari tabel di atas terlihat bahwa 95,68 % ibu hamil di wilayah Kota Bukittinggi sudah mendapatkan pelayanan Antenatal Care pertama kali,

sedangkan persentase ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan sebanyak 89,26 %.

Untuk pelaksanaan ANC terpadu pada Ibu Hamil, Dinas kesehatan melalui UPTD Puskesmas melaksanakan kegiatan yang berintegrasi dengan program lain, antar lain :

- Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke anak (PPIA)
- Pencegahan malaria dalam Kehamilan (PMDK)
- TB dalam Kehamilan
- Kecacingan dalam Kehamilan
- Pencegahan IMS dalam Kehamilan
- Pencegahan Hepatitis B dalam Kehamilan
- Pemeriksaan Hb,KEK,Protein Urin, Gula Darah
- Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil.

4. **Immunisasi Tetanus Toxoid dan Difteri (Td) pada Ibu Hamil**

Vaksin DPT jenis Tdap, direkomendasikan untuk diberikan pada **ibu hamil** di usia kehamilan 27-36 minggu atau segera setelah bayi lahir. Vaksin ini dapat diberikan, tanpa mempertimbangkan kapan terakhir kali **ibu hamil** mendapatkan vaksin Tdap atau **Td** (*tetanus-diphtheria*).

Immunisasi Vaksin Td yang disuntikkan berisi *booster* (penguat) berupa anti-tokso. Ini berfungsi menguatkan kekebalan tubuh. Untuk wanita hamil boleh divaksin Td. Syaratnya, wanita hamil baru boleh divaksin difteri pada trimester ke-2 atau trimester ke-3. Karena kalau masih trimester pertama itu usia kehamilannya masih rentan dan bahaya buat pembentukan janin di awal kandungan. Kekebalan tubuh pun baru terbentuk biasanya dua minggu kemudian setelah divaksin.

Tabel 6.4. Cakupan Immunisasi Td pada Ibu Hamil menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	Kecamatan	Jml Bumil	Immunisasi Td Pada Ibu Hamil								
			Td1		Td2		Td3		Td4		JML
			JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	
1	Guguk Panjang	756	120	15,9	121	16,0	129	17,1	123	16,3	120
2	Aur Birugo Tigo Baleh	522	86	16,5	166	31,8	174	33,3	87	16,7	27
3	Mandiingin Koto Selayan	1.141	154	13,5	230	20,2	211	18,5	172	15,1	157
	Kota Bukittinggi	2.419	360	14,9	517	21,4	514	21,2	382	15,8	304

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2021

Tabel 6.5. Cakupan Immunisasi Td pada Wanita Usia Subur menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jml WUS Tdk Hamil (15-35 TH)	Immunisasi Td Pada WUS Tidak Hamil							
			Td1		Td2		Td3		Td4	
			JML	%	JML	%	JML	%	JML	
1	Guguk Panjang	6.540	94	1,4	91	1,4	81	1,2	70	

2	Aur Birugo Tigo Baleh	4.515	12	0,3	18	0,4	29	0,6	15
3	Mandiingin Koto Selayan	9.863	252	2,6	72	0,7	53	0,5	52
	Kota Bukittinggi	20.918	358	1,7	181	0,9	163	0,8	137

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2021

5. Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe)

Zat besi merupakan tablet mineral yang diperlukan oleh tubuh untuk pembentukan sel darah merah atau hemoglobin. Unsur Fe merupakan unsur paling penting untuk pembentukan sel darah merah. *Zat besi* secara alamiah didapatkan dari makanan. Jika manusia kekurangan zat besi pada menu makanan yang dikonsumsinya sehari-hari, dapat menyebabkan gangguan anemia gizi (kurang darah). Tablet zat besi (Fe) sangat dibutuhkan oleh wanita hamil, sehingga ibu hamil diharuskan untuk mengonsumsi tablet Fe minimal sebanyak 60 tablet selama kehamilannya.

Manfaat Zat Besi (Fe)

Zat besi (Fe) berperan sebagai sebuah komponen yang membentuk *mioglobin*, yakni protein yang mendistribusikan oksigen menuju otot, membentuk enzim, dan kolagen. Selain itu, zat besi juga berperan bagi ketahanan tubuh.

Tablet zat besi (Fe) penting untuk ibu hamil karena memiliki beberapa fungsi berikut ini:

- Menambah asupan nutrisi pada janin
- Mencegah anemia defisiensi zat besi
- Mencegah pendarahan saat masa persalinan
- Menurunkan risiko kematian pada ibu karena pendarahan pada saat persalinan

Cakupan pemberian tablet zat besi di Kota Bukittinggi Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.6. Cakupan Tablet Fe pada Bumil Per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH IBU HAMIL	FE3 (90 TABLET)	
			JUMLAH	%
1	Mandiingin Koto Selayan	844	588	91
2	Guguk Panjang	693	587	84,7
3	Aur Birugo Tigo Baleh	502	465	92,63
KotaBukittinggi		2039	1820	89,26

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2022

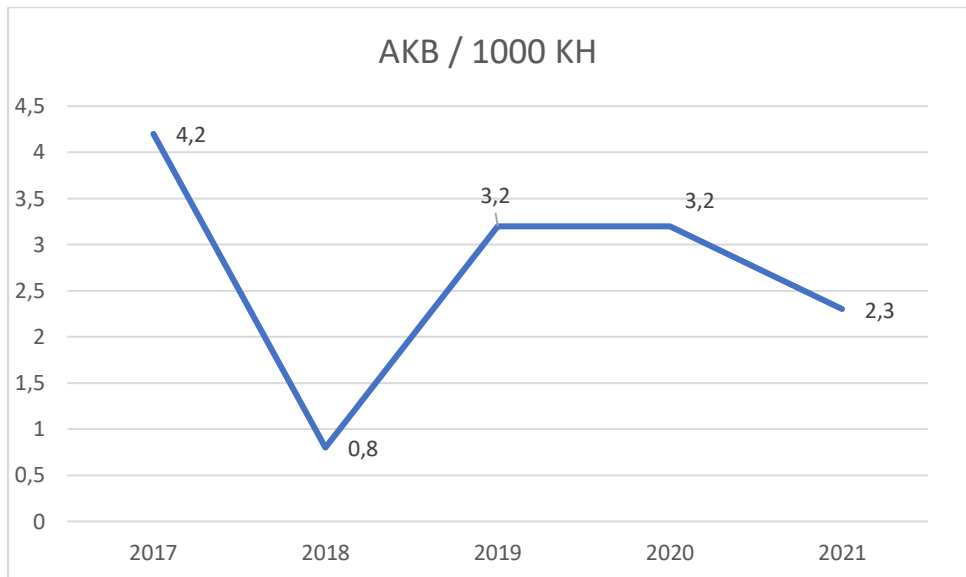
C. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* (IMR) merupakan salah satu indikator sangat sensitif untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat. AKB merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan AKB.

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Jumlah Kematian Bayi di Kota Bukittinggi tahun 2021 adalah sebanyak 4 kasus, atau Angka Kematian Bayi sebesar 2,3 /1.000 kelahiran hidup.. Grafik perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Bukittinggi dalam 5 tahun terakhir dapat di lihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 6.3. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Bukittinggi Tahun 2017-2021.



Sumber : Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2022

Grafik diatas memperlihatkan kasus kematian bayi pada tahun 2021 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Bayi usia kurang dari satu bulan mempunyai tubuh yang sangat lemah dan rentan terkena penyakit. Itulah kenapa bayi yang baru lahir perlu mendapatkan perhatian khusus supaya kesehatannya tetap optimal. Sebab jika tidak, hal ini bisa berakibat fatal dan menyebabkan kematian.

1. **Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif (0-6 bulan)**

Cara Pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan dan meneruskan menyusui anak sampai umur 24 bulan. Mulai umur 6 bulan, bayi mendapat makanan pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya.

ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi yang mengandung sel darah putih, protein dan zat kekebalan yang cocok untuk bayi. ASI membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal serta melindungi terhadap penyakit. Tabel berikut ini menyajikan persentase kecenderungan cakupan anak usia 0 – 6 bulan yang mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif tahun 2021 di Kota Bukittinggi.

Tabel 6.7. Cakupan Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2021

No	Kecamatan	Bayi Baru Lahir			Bayi Usia < 6 Bln		
		Jml	Mendpt IMD		Jml	Diberi ASI Eksklusif	
			Jml	%		Jml	%
1	Guguk Panjang	543	497	91,53	342	176	51,46
2	Mandiingin Koto Selayan	670	424	63,28	1246	736	59,07
3	Aur Birugo Tigo Baleh	432	327	75,69	434	116	26,73
	Kota Bukittinggi	1645	1248	75,87	2022	1028	50,84

Sumber : Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2022.

Data pada tabel di atas menggambarkan bahwa pemberian ASI Eksklusif kepada bayi 0-6 bulan masih rendah, hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor ;

- Gencarnya promosi susu formula untuk bayi 0-6 bulan yang tidak ada masalah medis
- Masih adanya tenaga kesehatan yang tidak berpihak terhadap hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif dan mendorong untuk menggunakan susu formula pada bayi 0-6 bulan.
- Pemasaran susu formula masih banyak yang ditujukan pada bayi yang tidak punya masalah kesehatan.

- Masih sangat terbatasnya tenaga konselor ASI
- Belum maksimalnya kegiatan edukasi, sosialisasi, advokasi, dan kampanye terkait pemberian ASI,
- Belum semua rumah sakit melaksanakan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM)
-

2. Pelayanan Kesehatan Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Berat Badan Lahir Rendah didefinisikan sebagai bayi lahir yang berat badannya kurang dari 2500 gram. Bayi yang mempunyai berat badan lahir rendah sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kecerdasan anak, cenderung mempunyai pertumbuhan fisik yang terhambat. Selain itu mudah terkena infeksi. Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah Kota Bukittinggi tahun 2021 adalah 2,2 %, dimana ditemukan 35 bayi dengan berat badan lahir <2500 gram . Adapun cakupan BBLR pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.8. Cakupan BBLR yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2021.

No.	Kecamatan	Jml Lahir Hidup	BBLR	%
1	Guguk Panjang	543	13	2,4
2	Mandiangan Koto Selayan	670	8	1,2
3	ABTB	432	14	3,3
Jumlah		1645	35	2,2

Sumber: Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2021.

Dari tabel di atas terlihat bahwa semua bayi BBLR sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

3. Pelayanan Immunisasi Lengkap Pada Bayi 0-11 Bulan

Program immunisasi di Kota Bukittinggi merupakan bentuk pencegahan penyakit dan perlindungan terhadap penyakit dengan memberikan vaksin pada sasaran immunisasi. Program imunisasi ini dilakukan oleh petugas puskesmas, tidak hanya menunggu di puskesmas akan tetapi mencari dan melaksanakan immunisasi di luar puskesmas seperti posyandu dan pos-pos pelayanan kelurahan lainnya, serta dengan pengembangan program pada bidan-bidan praktek swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh terhadap masyarakat.

Immunisasi Dasar Lengkap adalah bayi yang telah mendapatkan semua immunisasi mulai dari HB 0, BCG dan Polio1, DPT-HB3/DPT-HB-Hib3 1 dan Polio 2, DPT-HB3/DPT-HB-Hib3 2 dan Polio 3, DPT-HB3/DPT-HB-Hib3 3 dan Polio 4 serta mendapatkan campak.

Tabel 6.9. Cakupan Immunisasi Dasar Lengkap Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2021.

No	Kecamatan	Sasaran			Jumlah Bayi Mendapatkan					
					Immunisasi Lengkap					
		L	P	L+P	Laki-laki		Perempuan		L+P	
					Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	G.Panjang	363	360	723	93	25,6	98	55	191	26
2	ABTB	237	240	477	170	71,7	174	72,5	344	72,1
3	MKS	397	398	795	209	223	221	241	430	54
Jumlah		997	998	1.995	472	47,3	493	49,4	965	48,4
Sumber : Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2022										

Selama tahun 2021, bayi laki-laki yang telah mendapatkan immunisasi lengkap sebanyak 47,3 % (472 orang) sedangkan untuk bayi perempuan adalah sebanyak 49,4 % (493 orang).

4. Status Gizi pada Balita

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan di Kota Bukittinggi ditemukan 527 orang Balita yang underweight 7,96% Balita yang berstatus gizi sangat kurang 1,86% dan berstatus gizi kurang 6,1 %. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.10
STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN INDEKS BB/U, TB/U, DAN BB/TB
MENURUT KECAMATAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021

NO	KEC	JUMLAH BALITA 0-59 BLN YG DIUKUR	BALITA GIZI KURANG (BB/U)		BALITA PENDEK (TB/U)		BALITA KURUS (BB/TB)	
			JML	%	JML	%	JML	%
1	G.P	2268	172	7,6	239	10,5	77	3,4
2	MKS	3655	201	5,5	280	9,1	66	1,8
3	ABTB	993	108	10,9	169	17,0	64	6,4
	BKT	6916	481	7,0	688	10,9	207	3,0

Sumber Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2022

Dari tabel diatas diketahui bahwa Balita yang berstatus gizi kurus sesuai indikator BB/TB (gizi buruk dan gizi kurang) masih ditemukan sebanyak 3 % .

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya gizi buruk atau underweight pada anak, diantaranya disebabkan oleh terbatasnya asupan makan yang dikonsumsi atau makanan yang tidak memenuhi unsur gizi yang dibutuhkan. Disamping itu adanya infeksi menyebabkan rusaknya beberapa fungsi organ tubuh sehingga tidak mampu menyerap zat makanan secara baik.

Tabel diatas juga memperlihatkan bahwa masih terdapat 10,9 % Balita yang bersatus pendek (Stunting). Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun.

Masalah kesehatan ini merupakan akibat dari berbagai faktor yang terjadi pada masa lalu. Berbagai faktor tersebut antara lain asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, [bayi lahir prematur](#), serta [berat badan lahir rendah \(BBLR\)](#).

Kondisi tidak tercukupinya asupan gizi anak ini biasanya tidak hanya terjadi setelah ia lahir saja, melainkan bisa dimulai sejak ia masih di dalam kandungan. Selain itu yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan stunting pada anak, yaitu:

- Kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan.
- Terbatasnya akses pelayanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan *postnatal* (setelah melahirkan).
- Kurangnya akses air bersih dan sanitasi.
- Masih kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal.

Untuk mencegahnya, ibu hamil perlu menghindari faktor di atas.

D. Stunting

Pemerintah Indonesia telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional. Komitmen ini terwujud dalam masuknya stunting ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dengan target penurunan yang cukup signifikan dari kondisi 27,6 persen pada tahun 2019 diharapkan menjadi 14 persen pada tahun 2024. Sebelumnya Presiden RI telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dibawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebagai koordinator atau Ketua Pelaksana percepatan penurunan stunting di Indonesia.

Prof. dr. Endang, L. Achadi, Ph. D mengatakan Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat

kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Anak stunting lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berfikir. Hampir 50 persen kasus stunting tercipta dari kehamilan.

“Perbaikan status kesehatan dan gizi ibu hamil dan pra-hamil merupakan program strategis dlm meningkatkan kualitas SDM Bangsa 3 generasi kedepan karena kedaruratan dampak stunting terhadap Kualitas SDM Indonesia, perbaikan pengetahuan yg esensial tentang gizi dan kesehatan perlu dilakukan secara sistematis dan luas mencakup berbagai kelompok target, serta dilakukan secara massive dan berulang dan perlu dimulai sejak remaja karena status gizi dan kesehatan remaja puteri sebelum memasuki kehamilannya sangat penting dalam melindungi periode 1000 HPK”

Dalam kesempatan yang sama, Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D berujar, Pemahaman tentang pentingnya penanganan stunting bagi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia belum dipahami secara luas oleh pemangku kepentingan, karena masalah stunting baru diprioritaskan awal tahun 2010. Selama lebih kurang setengah abad masalah kekurangan gizi lebih difokuskan kepada malnutrition dan wasting yang berdasarkan indikator berat badan menurut umur.

“Pencegahan stunting lebih efektif apabila dimulai dari keluarganya, tidak hanya keluarga miskin tapi seluruh keluarga Indonesia. Kita dapat memanfaatkan kelompok-kelompok kegiatan yang ada di daerah dan bagaimana proses tersebut dapat terdata dengan baik, terutama dapat terdata dalam Pendataan Keluarga 2021

Hasil pendataan Keluarga Kota Bukittinggi Tahun 2021 telah mengeluarkan data Keluarga sasaran menurut penapisan Potensi Risiko Stunting Pendataan Keluarga, seperti pada table berikut :

Tabel 6.11. Jumlah Keluarga Sasaran Menurut Penapisan Potensi Risiko Stunting Tahun 2021

			Sasaran	Kategori Keluarga
--	--	--	---------	-------------------

Kecamatan	Jml Keluarga	Jml Kel. Sasaran					beresiko Stunting	
			Punya Anak		PUS	PUS Hamil	Resiko	Tdk Beresiko
			Baduta (0-24 bln)	Balita (24 - 59 bln)				
G.Panjang	8521	4595	793	1325	4525	230	3658	937
MKS	10542	6230	942	1761	6167	269	4805	1425
ABTB	5745	3515	614	1066	3483	202	2824	691
JUMLAH	24808	14340	2349	4152	14175	701	11287	3053

Sumber : DP3APPKB Th 2022

Pada Tabel 6 .11 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 11.287 keluarga yang beresiko stunting dari 14.340 kel. Sasaran. Diperlukan upaya maksimal dalam penanggulangan stunting.

Ada dua kelompok faktor resiko/penyebab stunting sebagai indikasi masalah gizi kronis:

- Penyebab langsung: yaitu kurangnya asupan makanan bergizi dan infeksi berulang dalam jangka waktu tertentu (kronis).
- Penyebab tidak langsung: terdiri dari berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya penyebab langsung dari stunting akibat masalah gizi kronis. Faktor-faktor tersebut antara lain terkait masalah akses terhadap makanan bergizi, pola asuh yang kurang optimal, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, praktik hygiene, atau masalah kesehatan lingkungan yang mempengaruhi akses ke air bersih dan sanitasi (lingkungan). Penyebab tidak langsung ini dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang mendasar seperti faktor ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan/atau pemberdayaan perempuan.

E. Posyandu

Tabel 6.13. Jumlah Posyandu menurut Strata Posyandu Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020.

No	Kecamatan	Strata Posyandu				Jml
		Pratama	Madya	Purnama	Mandiri	
1	MKS	1	4	32	11	48
2	GP	1	33	18	5	57
3	ABTB	3	6	22	0	31
Jumlah		5	43	72	16	136

Sumber: Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2021.

Tabel diatas memperlihatkan bahwa semakin menurunnya strata Posyandu yang Purnama dan Mandiri , menjadi strata Pratama dan Madya, jika dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan pandemi Covid 19 yang terjadi di tahun 2020, sehingga jumlah buka posyandu kurang dari 10 kali per tahun.

F. Penderita HIV /AIDS

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Human Immunodeficiency Virus yang menyerang system kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebaga HIV positif.

Pemetaan epidemi HIV di Indonesia dibagi menjadi lima kategori, yaitu <90 kasus, 90-206 kasus, 207-323 kasus, 324-440 kasus, dan > 440 kasus. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, dan Komisi Perlindungan HIV/AIDS Kota Bukittinggi, pada tahun 2021 ini, tercatat sebanyak 993 orang penambahan kasus baru HIV/AIDS di Kota Bukittinggi. Di Kota Bukittinggi pada tahun 2021 kasus HIV sebanyak 62 kasus yang terdiri atas 47 orang laki-laki dan 15 orang perempuan..

Pada 2021, sejak Januari hingga Oktober, telah dilakukan tes VCT kepada 1.045 orang, ditemukan HIV positif 18 orang. Kasus HIV AIDS positif ini, juga masih didominasi laki-laki dengan rentang umur 25-49 tahun, Jumlah 18 orang itu, menjadikan Kota Bukittinggi menjadi terbanyak kedua di Sumatera Barat setelah Kota Padang, karena faskes di Bukittinggi menjadi salah satu lokasi tempat pelayanan dari penanganan HIV AIDS di Sumatera Barat sehingga data yang ada di rumah sakit itu, tercatat sebagai kasus Kota Bukittinggi.

Tabel 6.14. Cakupan Penderita HIV/AIDS berdasarkan Kelompok Umur di Kota Bukittinggi Tahun 2021.

No	Umur	HIV/ AIDS		
		Lk	Pr	Jml
1	≤ 4 th	0	0	0
2	5 – 14 th	1	0	1
3	15 – 19 th	0	0	0
4	20 – 29 th	7	1	8
5	30 – 39 th	35	13	48

6	40 – 49 th	0	0	0
6	<u>50 - 59 th</u>	3	1	4
7	<u>>60 th</u>	0	0	0
	Total	47	15	62

Sumber: Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2021.

G. Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang dicanangkan sejak tahun 1990 an. Program Keluarga Berencana lebih menekankan kualitas keluarga dari pada kuantitasnya.

Alat yang paling banyak digunakan perempuan usia 15 sampai dengan 49 tahun di Kota Bukittinggi adalah suntik , IUD dan Implan, sedangkan yang paling sedikit adalah MOW (Medis Operasi Wanita). Sedangkan Akseptor KB laki-laki masih sangat rendah yaitu 45 orang MOP dan 1523 orang Kondom.

Contraceptive Prevalence Rate (CFR)

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut *Contraceptive Prevalence Rate* (CFR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangan menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk wanita kawin atau wanita yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja.

Contraceptive Prevalence Rate (CFR) merupakan perbandingan jumlah peserta KB aktif dengan jumlah pasangan usia subur kemudian hasilnya dikali 100. Pada tahun 2021 jumlah peserta KB aktif adalah sebanyak 10 674 orang sementara jumlah pasangan

usia subur adalah 26.270 orang., maka CFR tahun 2021 adalah 40,6 %.

**TABEL 6.15. PESERTA KB AKTIF MENURUT JENIS KONTRASEPSI,
KECAMATAN**

KOTA BUKITINGGI TAHUN 2021

KEC.	JML PUS	PESERTA KB AKTIF										
		KONDOM	%	SUNTIK	%	PIL	%	AKDR	%	MOP	%	MOW
GP	13.804	443	24,5	1092	31,1	711	20,3	612	17,4	31	0,9	171
MKS	7988	574	13,7	1686	40,2	793	18,9	817	19,5	7	0,2	139
ABTB	4478	506	17,0	1116	37,6	328	11,0	585	19,7	7	0,2	176
Bukittinggi	26.270	1523	14,3	3894	36,5	1832	17,2	2014	18,9	45	0,4	486

Sumber: Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi.

H. Usia Perkawinan Pertama

Revisi Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang pada pokoknya merubah usia perkawinan anak-anak perempuan dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Dalam Undang-Undang tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan). Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Usia Perkawinan Pertama Hasil pendataan Keluarga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.16. Usia Perkawinan Pertama PUS perKecamatan hasil pendataan Keluarga di Kota Bukittinggi tahun 2021

No	Kecamatan	JML PUS	PEREMPUAN				LAKI-LAKI			
			<19 TAHUN		≥ 19 TAHUN		< 25TAHUN		≥ 25 TAHUN	
			JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
1	G. Panjang	4.525	278	6,14	4.247	93,86	1.067	23,58	3.458	76,42
2	MKS	6.167	284	4,61	5.883	95,39	1.333	21,62	4.834	78,38
3	ABTB	3.483	138	3,96	3.345	96,04	659	18,92	2.824	81,08
Jumlah		14.175	700	4,94	13.475	95,06	3.059	21,58	11.116	78,42

Sumber: DP3APPKB Kota Bukittinggi

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 4,94 % perempuan yang menikah diusia muda kurang dari 19 tahun dan 21,58 % laki-laki menikah diusia kurang dari 25 tahun. Terlihat bahwa perkawinan pertama di Kota Bukittinggi sebagian besar adalah pada usia lebih dari 19 tahun pada perempuan dan lebih dan sama 25 tahun.pada laki-laki.

Pertimbangan UU Nomor 16 tahun 2019 terkait kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin antara lain bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

I. Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut data yang dilaporkan oleh Polres Bukittinggi, dilaporkan jumlah kriminal Narkotika diterima 70 kasus, dan diputuskan sebanyak 60 kasus.

J. Kota Layak Anak (KLA)

Kota layak anak adalah Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan yang diukur melalui 24 indikator yang mencerminkan pemenuhan hak dan perlindungan anak dari aspek kelembagaan dan 5 (lima) klaster substansi Konvensi Hak Anak (KHA), dengan kategori :

- Pratama;
- Madya
- Nindya:
- Utama dan;
- Kota Layak Anak (KLA)

Capaian Kota Layak Anak pada tahun 2015, 2017 dan tahun 2018 masih pada tahap dasar yaitu Pratama dan tahun 2020, 2021 perolehan penghargaan naik setingkat menjadi kategori Madya, sedangkan untuk tahun 2022 meningkat menjadi Nindya artinya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak tahun 2021 sudah terakomodir sebanyak 62%.

**Tabel 6.17. Capaian Kota layak Anak Kota Bukittinggi
Tahun 2016-2021**

No.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Capaian KLA	Pratama	Pratama	Madya	Tidak Ada Penilaian	Madya	Madya

Sumber: DP3APPKB, 2021

BAB VII

EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak hanya bertujuan untuk membantu memenuhi perekonomian rumah tangga dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya, tetapi juga untuk mencapai kepuasan individu. Oleh karena itu keterlibatan perempuan dalam urusan ketenaga kerjaan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Semakin banyak perempuan yang bekerja, secara tidak langsung dapat menunjukkan semakin banyak perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Secara umum penduduk yang telah memasuki usia kerja diharapkan mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan perekonomian, demikian pula dengan penduduk perempuan. Penduduk yang telah memasuki usia kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri atas penduduk bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Data mengenai ketenagakerjaan di Indonesia diperoleh berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun.

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja, baik yang bekerja atau yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah berusia 15 tahun ke atas. Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja, bisa jadi mereka tergolong bukan angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Misalnya ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa dan sebagainya.

Tabel 7.1. Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2021

No	Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	LK +PR
I	Angkatan Kerja			
	1. Bekerja	38.368	29.510	64.878
	2. Pengangguran Terbuka			
	Pernah Bekerja	1.407	1.086	2.493
	Tidak Pernah Bekerja	1.110	606	1.716
	Jumlah	2.517	1.692	4.209
	Total Angkatan Kerja	37.885	31.202	69.087
II	Bukan Angkatan Kerja			
	1. Sekolah	6.151	8.947	15.098
	2. Mengurus rumah tangga	1,583	11.617	13.200
	3. Lainnya	3.535	1.560	5.095
	Jumlah	11.269	22.124	33.393
III.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)(%)	77,07	58,51	67,42
IV	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,64	5,42	6,09

Sumber: BPS Kota Bukittinggi Tahun 2022, Hasil Sarkernas

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bukittinggi pada tahun 2021 sebanyak 67,42, angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini berarti dari 100 orang penduduk usia kerja di Kota Bukittinggi terdapat 67 penduduk termasuk dalam angkatan kerja. Terbagi menjadi 2 golongan yaitu penduduk yang bekerja sebanyak 64.874 orang dan pengangguran 4.209 orang.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin terlihat tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih banyak dari pada perempuan yaitu laki-laki 77,07 % berbanding 58,51% perempuan.

Banyaknya perempuan yang tidak termasuk angkatan kerja disebabkan perempuan yang berstatus ibu rumah tangga dan masih sekolah.

B. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan persentase penduduk yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, dan yang tidak mencari pekerjaan atau tidak mempersiapkan usaha karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan karena sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja biasanya tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kemiskinan dan kerawanan sosial yang ditimbulkannya.

Terdapat angka pengangguran terbuka sebesar 6,09 % , artinya setiap 100 orang Angkatan kerja terdapat lebih kurang 6 orang yang menganggur. Terlihat adanya perbedaan tingkat pengangguran terbuka antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki 6,64 % dan perempuan 5,42 %.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, TPT Kota Bukittinggi sebesar 7,51 persen, jadi telah terjadi penurunan TPT sebanyak 1,42 persen pada tahun 2021. Semakin menurun angka TPT mengindikasikan bahwa semakin berkurang pengangguran di Kota Bukittinggi. Turunnya angka pengangguran Kota Bukittinggi disebabkan oleh banyaknya pelaku usaha yang mulai menambah karyawan/pegawai setelah hilangnya pandemi covid-19

C. Status Pekerjaan

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/ kegiatan. Indikator status pekerjaan terdiri dari enam kategori yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, berusaha dibantu buruh tidak tetap, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas dan pekerja keluarga/pekerja tak dibayar.

Status pekerjaan utama penduduk Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel 7.2 berikut ini :

Tabel. 7.2 Jumlah Penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Bukittinggi Tahun 2021

No	Status Pekerjaan Utama		
		Jumlah	%
1	Berusaha sendiri.	12.828	22,81
2	Berusaha dibantu buruh tdk tetap/ buruh tak dibayar.	7.564	13,45
3	Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar.	4.361	7,75
4	Buruh/karyawan/ pegawai.	29.606	52,63
5	Pekerja bebas (pertanian, non pertanian, pekerja keluarga)	1.889	3,36
	Total	56.248	100,00

Jika dilihat dari status pekerjaan pada Tabel 7.2, penduduk Kota Bukittinggi yang berumur 15 tahun ke atas mayoritas bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai yaitu 29.606 (52,63 persen). Sedangkan sebagai pekerjaan berusaha sendiri merupakan posisi kedua yaitu 12.828 orang (22,8 persen). Sedangkan status pekerja yang menjalankan usahanya sebagai pekerja bebas adalah persentase terkecil yaitu sebesar 3,35 persen.

Pada Agustus 2021, terjadi kenaikan rata-rata upah/gaji bersih buruh/karyawan sebesar 2,11 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, rata-rata upah buruh/ karyawan laki-laki sebesar Rp.2.800.817 dan untuk upah buruh / karyawan perempuan sebesar Rp. 2.463.864.

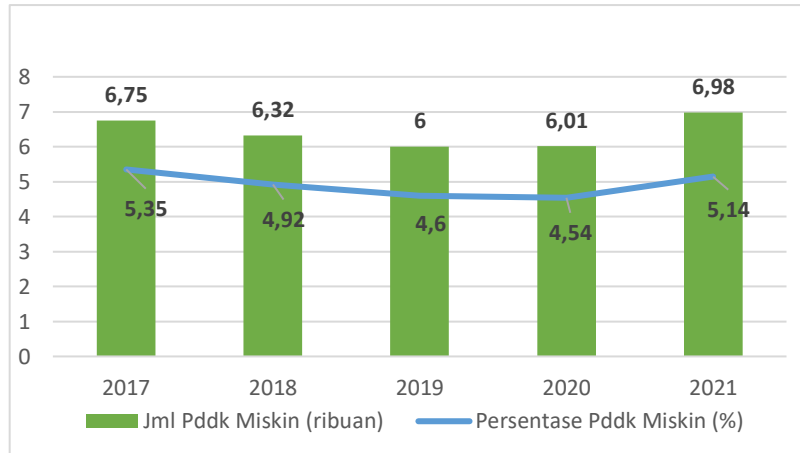
D. Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori perkapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Pada tahun 2021 Garis Kemiskinan berada pada lima ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah perkapita perbulan (Rp. 540.547). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan maka dianggap sebagai penduduk miskin.

Penduduk miskin adalah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Pada tahun 2021 terdapat jumlah penduduk miskin adalah 6.980 jiwa atau 5,14 % penduduk Bukittinggi yang berada dibawah garis kemiskinan. (Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Gambar 7.1. Jumlah Penduduk Miskin (ribuan) dan Persentase Penduduk Miskin Kota Bukittinggi, 2017-2021



Sumber :bps.go.id

Kenaikan persentase penduduk miskin dan meningkatnya jumlah penduduk miskin sebesar 970 jiwa pada tahun 2021 mengindikasikan bahwa pengurangan (migrasi) penduduk Kota Bukittinggi yang bekerja jumlahnya sedikit dibanding orang yang tidak bekerja. Peningkatan persentase penduduk miskin di Kota Bukittinggi bukanlah hal besar, karena angka 6 persen adalah angka yang kecil dan sulit untuk dipertahankan untuk lebih rendah lagi. Namun untuk mempertahankan angka kemiskinan tetap kecil di Kota Bukittinggi, pemerintah perlu meningkatkan atau memperketat aturan program kemiskinan untuk tahun selanjutnya.

Apabila dikaitkan dengan Garis Kemiskinan (GK), semakin tinggi garis kemiskinan juga menjadi faktor pendorong semakin bertambahnya jumlah dan persentase penduduk miskin. Oleh karena itu, cara agar jumlah dan persentase penduduk miskin bisa ditekan/dikendalikan adalah dengan mengendalikan harga-harga kebutuhan masyarakat pada satu sisi dan memacu peningkatan pendapatan masyarakat pada sisi lainnya.

E. Pendidikan Tertinggi Penduduk Bekerja

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ia tamatkan. Sehingga, sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur

Bila dilihat dari jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk bekerja di Kota Bukittinggi Tahun 2021, mayoritas adalah SMA Umum, sebagaimana terlihat pada dibawah ini.

Tabel 7.3 Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas termasuk

Pengangguran dan pendidikan tertinggi yang di tamatkan di Kota Bukittinggi Tahun 2021

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Jumlah	%
Tidak / Belum pernah sekolah /Belum Tamat SD	323	7,67
Sekolah Dasar	559	13,28
SMP	732	17,39
SMA Umum	1277	30,34
SMA Kejuruan	599	14,23
Diploma I/II/III/ Akademi	NA	

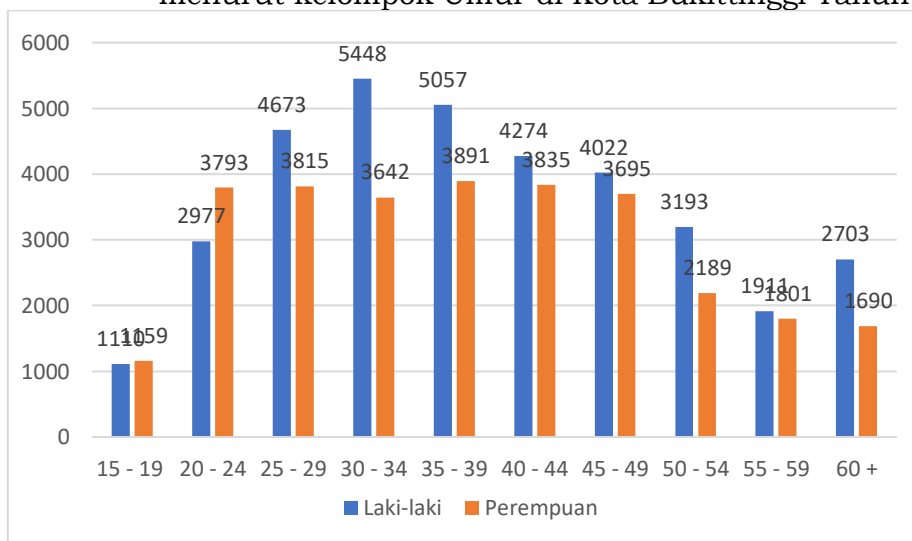
Universitas	719	17.08
Jumlah	4209	

Sumber : BPS , 2021

F. Penduduk Bekerja menurut Kelompok Umur

Penduduk bekerja menurut kelompok umur dapat dilihat pada gambar 7.1 berikut :

Gambar 7.1 Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut kelompok Umur di Kota Bukittinggi Tahun 2021



Sumber : BPS 2021

Gambar 7. 1 diatas memperlihatkan bahwa usia terbanyak dari penduduk yang bekerja adalah kelompok umur 30 -34 tahun bagi penduduk laki-laki, sedangkan untuk Perempuan tertinggi bekerja pada usia 35-39 tahun.

Pada gambar terlihat pada kelompok umur 15 -24 tahun, perempuan bekerja lebih banyak dari pada laki-laki. Hal ini disebabkan karena banyaknya perempuan yang bekerja disektor perdagangan.

G. Dampak Covid 19 terhadap penduduk usia kerja

Covid 19 yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020, telah menyebabkan terjadinya pengaruh terhadap penduduk usia kerja pada tahun 2021, antara lain :

- Pengangguran karena covid 19 = 901 orang
- Bukan Angkatan Kerja karena covid 19 = 453 orang
- Sementara tidak bekerja karena Covid 19 = 1.064 orang
- Pengangguran jam kerja karena Covid 19 = 10.089 orang

Dengan meningkatnya pengangguran diharapkan menjadi catatan bagi pemerintah Kota Bukittinggi untuk dapat meningkatkan serta membuka lapangan pekerjaan bagi kelompok tersebut yang cocok atau memberikan pelatihan secara offline atau online untuk meningkatkan skill mereka yang terdampak. Dengan membuka lapangan pekerjaan baru bagi mereka di daerahnya dapat menjadi peluang baru untuk turut serta dalam pembangunan. Sedangkan untuk penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi yang belum terserap di lapangan pekerjaan diharapkan berpartisipasi dalam berwira usaha sehingga juga dapat turut serta dalam membangun daerahnya. Peran pemerintah dalam hal ini adalah dengan mendorong dan memberi insentif bagi mereka yang berinisiatif untuk membuka peluang berwira usaha.

H. Lapangan Usaha

Bekerja merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan aktivitas ekonomi suatu wilayah. Lapangan usaha yang terbesar di Kota Bukittinggi adalah pada perdagangan besar dan eceran, rumah makan dan hotel.

Tabel 7.3. Jumlah Kepala Keluarga menurut Jenis Pekerjaan di Kota Bukittinggi Tahun 2021

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	Petani	532	2,35
2	Nelayan	7	0,03
3	Pedagang	5.950	26,33
4	Pejabat Negara	41	0,18
5	PNS/TNI/Polri	1.953	8,64
6	Pegawai Swasta	3.052	13,60
7	Wiraswasta	3.824	16,92
8	Pensiunan	1.374	6,08
9	Pekerja Lepas	5.868	25,96
	JUMLAH BEKERJA	22.601	91,1
	TIDAK BEKERJA	2.207	8,90

Sumber : Pendataan Keluarga Tahun 2021 (DP3APPKB)

Tabel 7.4. Persentase Penduduk berumur 15 Tahun keatas Yang Bekerja di Kegiatan Informal menurut Pekerjaan utama di Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Lk	Pr	Lk + Pr
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan.	923	363	1286
2	Pertambangan dan penggalian	198	-	198
3	Industri/ pengolahan.	3388	4524	7912
4	Listrik, Gas dan air	427	240	667
5	Bangunan	1791	177	1968
6	Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel.	1733	13991	31324
7	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	3244	931	4175

8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan bangunan, Tanah dan jasa perusahaan	1555	870	2425
9	Jasa Kemasyarakatan, social dan perorangan.	6426	8535	14961
Jumlah		35285	29631	64916

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, Hasil Sakernas 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa lapangan pekerjaan yang terbanyak baik laki-laki maupun perempuan banyak pada lapangan pekerjaan perdagangan besar, eceran, rumah makan, hotel dan jasa.

Tabel 7.5. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi, 2021

Jumlah Jam Kerja Seluruhnya (Jam)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0	843	2 057	2 900
1—14	2 525	3 541	6 066
15—24	2 686	2 254	4 940
25—34	2 826	4 206	7 032
35—40	5 115	5 445	10 560
41+	21 373	12 007	33 380
Jumlah	35 368	29 510	64 878

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, Hasil Sakernas 2021

Tabel 7.6. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi, 2021

Jumlah Jam Kerja Seluruhnya (Jam)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0	843	2 057	2 900
1—14	2 525	3 541	6 066

15—24	2 772	2 724	5 496
25—34	3 216	4 416	7 632
35—40	9 209	9165	18 374
41+	16 803	7 607	24 410
Jumlah	35 368	29 510	64 878

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, Hasil Sakernas 2021

I. Usaha Mikro dan Kecil (UKM)

Bukittinggi sebagai Kota wisata sangat besar pengaruhnya kepada roda perekonomian di Kota Bukittinggi, sehingga bermunculan usaha-usaha perekonomian masyarakat berupa Usaha Menengah Kecil dan Mikro yang terdiri dari sentra-sentra industri.

Tabel 7.7. Jumlah Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) Kota Bukittinggi Tahun 2020

No.	Kec	Kecil	Menengah	Mikro	Jumlah
1.	ABTB	162	8	1343	1.513
2.	GP	315	19	2091	2.425
3.	MKS	175	4	3337	3.516
Jumlah		652	31	6.771	7.454

Sumber: Dinas KUKMP Kota Bukittinggi Tahun 2021.

Tabel 7.5 di atas menggambarkan bahwa UMKM yang paling banyak terdapat di Kota Bukittinggi adalah usaha mikro. Usaha mikro ini tersebar sebagian besar di Kecamatan Guguk Panjang dan lebih banyak dikelola oleh perempuan seperti terlihat pada tabel 7.6 berikut.

Tabel 7.8. Data Jumlah Tenaga Kerja menurut Jenis Kelamin pada UMKM Per Kecamatan di Kota Bukittinggi

No.	Kecamatan	Kecil			Menengah			Mikro		
		L	P	L + P	L	P	L+P	L	P	L + P
1	ABTB	271	219	490	13	4	17	1.362	1650	3.012
2	GP	404	297	701	38	17	55	1.196	1.570	2.766
3	MKS	253	241	494	6	42	48	908	1.043	1.951
Jumlah		928	757	1685	57	63	120	3466	4.263	7.729

Sumber: Dinas KUKMP Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Tabel di atas menggambarkan bahwa tenaga kerja pada usaha kecil lebih banyak dikelola oleh laki-laki dibandingkan dengan tenaga perempuan, sedangkan untuk usaha menengah dan usaha mikro lebih banyak berperan perempuan dari pada laki-laki.

Data sentra industri yang ada di Kota Bukittinggi, pada umumnya bergerak pada industri pangan, sandang, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronik serta kerajinan. Jenis industri pangan terbanyak adalah usaha kue basah, kerupuk dan sejenisnya. Dan usaha ini lebih banyak menyerap tenaga kerja. Sedangkan jumlah industri di bidang sandang lebih banyak mengelola pakaian jadi dari tekstil dan juga banyak menyerap tenaga kerja, Jenis industri lain yang banyak di Kota Bukittinggi yaitu kerajinan khususnya bordir dan sulaman yang tenaga kerjanya pada umumnya adalah perempuan.

Koperasi merupakan badan hukum yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi terdiri dari beberapa jenis tergantung kepada tujuan koperasi atau latar belakang koperasi, misalnya koperasi Pegawai negeri Sipil, Koperasi Simpan Pinjam dan lain-lain.

Tabel 7.9. Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Koperasi Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2021

No	Kecamatan	Jml Koperasi Aktif	Anggota		
		Aktif	L	P	L + P
1	MKS	17	817	890	1.707
2	ABTB	24	2.360	1.930	4.290
3	GP	54	4.362	4.742	9.104
Jumlah		95	7.539	7.562	15.101

Sumber: Dinas KUKMP Kota Bukittinggi Tahun 2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa partisipasi perempuan untuk ikut sebagai anggota koperasi cukup tinggi, ini berarti minat dari kaum perempuan cukup tinggi untuk peningkatan kesejahteraan kaum perempuan dan keluarganya serta masyarakat/organisasinya. Diharapkan peningkatan kesejahteraan ini mampu menciptakan perempuan yang maju dan lebih berdaya.

Kota Bukittinggi memiliki 95 koperasi pada 3 kecamatan, dan sudah bisa menyerap tenaga kerja/karyawan, seperti pada tabel berikut :

Tabel 7.10. Partisipasi Perempuan sebagai Pengurus Koperasi Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	Kec	Aktif	Manager			Karyawan		
			L	P	L+P	L	P	L+P
1	MKS	17	1	0	1	20	11	31
2	ABTB	24	0	1	1	22	43	65
3	GP	54				26	67	93
Jumlah		95	1	1	2	68	121	189

Data di atas memperlihatkan bahwa baik manager maupun karyawan yang menjadi pengurus koperasi sudah diduduki oleh kaum perempuan, hal ini membuktikan bahwa perempuan sudah dapat dipercaya sebagai tenaga yang dianggap mampu mengelola koperasi dikarenakan oleh ketelitian atau keahliannya.

J. Pekerja pada Instansi Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah

Tabel 7.12. Tenaga Kerja di Lembaga/BUMN/BUMD/Instansi Vertikal

No	Lapangan Usaha	Jumlah Tenaga Kerja		JUMLAH
		L	P	
1	Kantor Pos	23	14	37
2	Bank Nagari	68	52	120

3	BRI	101	79	180
4	BNI	41	72	113
5	BTN	12	6	18
6	Kemenag	61	51	112
7	BPS	7	17	24
8	PDAM		18	
9	Bulog		7	
10	Pengadilan Agama	20	14	34
Jumlah		333	305	638

Sumber: Instansi Vertikal/Lembaga Tahun 2021.

Tabel 7.13. Tenaga Dosen, Karyawan dan Mahasiswa Perguruan Tinggi Tahun 2020 di Kota Bukittinggi.

No	NAMA PERGURUAN TINGGI	REKTOR / DEKAN		DOSEN		KARYAWAN/ TENAGA PENDIDIK	
		L	P	L	P	L	P
1	UNP PGSD			15	29	6	6
2	AMIK BUKITTINGGI			6	10	5	6
3	UNIVERSITAS MHD. NATSIR	1		4	11	4	2
4	FAK. HUKUM MUHAMMADIYAH SUMBAR	1	1	23	10	7	5
5	POLTEKES PRODI KEBIDANAN	0	0	2	13	2	9
6	POLTEKES PRODI KESEHATAN GIGI	0	0	6	12	17	5
7	STIKES PRIMA NUSANTARA	3	6	3	8	8	4
8	STIKES YARSI	0	0	4	29	10	10
9	STIKES FORT DE KOCK	2	9	10	58	7	8
10	STIKES PERINTIS	3	9	5	15	14	19
11	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH	0	0	5	21	1	5
12	AKBID PELITA ANDALAS	0	4	1	6	1	3
13	AKFAR DWI FARMA	0	0	4	7	11	11

14	AKFAR YAYASAN IMAM BONJOL (YIB)	1	3	2	4	1	4
15	ITB H.AGUS SALIM	2	2			15	11
JUMLAH		13	34	90	233	109	108

Tabel 7.14. Jumlah Tenaga Kesehatan (Medis) di Kota Bukittinggi Tahun 2021.

No	Jenis Profesi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Dokter Spesialis	125	85	210
2.	Dokter umum	40	98	138
3.	Dokter gigi	3	25	28
4.	Bidan	0	175	175
5.	Perawat	133	734	867
6.	Perawat gigi	7	38	45
7.	Tenaga Teknis kefarmasian	22	156	187
8.	Apoteker	13	47	60
9.	Kesehatan Masyarakat	10	29	39
10.	Kesehatan Lingkungan	7	11	18
11.	Nutrisisionis	11	56	67
12.	Ahli Labor Medik	14	64	78
13.	Keterampilan Fisik	13	21	34
14.	Tenaga Teknik Biomedik	7	7	14
15.	Keteknisan Medis	44	162	206
JUMLAH		449	1708	2166

BAB VIII

BIDANG POLITIK DAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

Keterlibatan perempuan dalam politik, merupakan sebuah keharusan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan secara politis. Dikuatirkan rendahnya keterlibatan perempuan di partai politik dan parlemen, berdampak langsung pada kecilnya alokasi perhatian terhadap pembangunan kesejahteraan perempuan, karena kebijakan-kebijakan dibuat tidak berdasarkan pada kepentingan dan kebutuhan perempuan, sehingga perempuan hanya diposisikan sebagai objek pembangunan dimana hak-hak dan kebutuhan kesejahteraannya terabaikan.

Akhirnya yang terjadi adalah, perempuan selalu berada pada posisi yang marjinal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator, diantaranya dilihat dari sistem pengupahan, upah perempuan lebih rendah daripada laki-laki, jaminan kesehatan perempuan lebih rendah dari pada laki-laki, kebijakan-kebijakan moralitas lebih berpihak pada laki-laki dan sebagainya. Minimnya keterlibatan dan partisipasi politik perempuan ini, menjadi penyumbang terhadap termarjinalnya perempuan dalam pembangunan.

Oleh sebab itulah negara-negara penanda tangan konvensi CEDAW PBB di desak untuk melakukan tindakan nyata dalam mengatasi segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan. Di Indonesia salah satunya lahir gerakan *affirmative action* tindakan khusus yang dilakukan oleh negara untuk memberikan peluang, kesempatan dan dorongan kepada perempuan agar terlibat dan berpartisipasi dalam politik. *Affirmative action* juga dapat difahami sebagai kompensasi negara terhadap perempuan yang selama ini termarjinalkan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang tidak berwawasan gender tersebut. *Affirmative action* ini berlaku setelah pemerintahan reformasi di Indonesia.

Bentuk dari *affirmative action* itu diantaranya adalah, *pertama* mengaruskan pada semua partai politik dimana 30% pengurusnya adalah

perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat 1 UU No 12/2003. *Kedua* mengajukan prinsip keterwakilan perempuan dimana masing-masing partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan untuk memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Prinsip keterwakilan ini lebih dikenal dengan prinsip kuota 30% keterwakilan perempuan.

A. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur penting dalam pengambilan kebijakan di daerah. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD mempunyai kebijakan yang sangat strategis dalam bidang politik, budaya, pembangun, ekonomi dan kesejahteraan. Untuk itu, sangat diperlukan keberimbangan anggota DPRD tersebut, sehingga terwujud ada kebijakan yang berimbang antara kepentingan kesejahteraan laki-laki dan perempuan.

Di kota Bukittinggi, kiprah perempuan dalam politik pertama-tama dapat dilihat dari komposisi perempuan dalam bidang politik. Data menunjukkan bahwa perempuan telah terlibat dalam bidang politik, hanya saja apabila dibandingkan dengan laki-laki, keterlibatan perempuan jauh lebih rendah, hanya 2 orang (8%) perempuan yang duduk di legislatif dibandingkan laki-laki 23 orang (92%).

Tabel 8.1. Jumlah Anggota DPRD Kota Bukittinggi menurut Partai dan Jenis Kelamin, Kota Bukittinggi Tahun 2021

NO	PARTAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P
1	GERINDRA	5	0	5
2	PKS	5	0	5
3	DEMOKRAT	4	0	4
4	GOLKAR	3	0	3

5	PAN	1	2	3
6	PPP	2	0	2
7	NASDEM	2	0	2
8	PKB	1	0	1
TOTAL		23	2	25

Sumber: Sekretariat DPRD (Setwan) Kota Bukittinggi Tahun 2021.

Angka ini masih jauh dari yang dicita-citakan, yakni 30% menurut Undang-undang No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD dan DPD.

Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya rendahnya kemauan perempuan untuk terlibat dalam politik atau belum munculnya kesadaran perempuan dalam berpolitik. Padahal undang-undang sudah memberikan peluang yang sangat besar agar perempuan mempunyai keterlibatan dalam berpolitik.

Keberadaan perempuan di DPRD akan terlihat peranannya di komisi yang ada. Misalnya tugas Komisi A terkait dengan pemerintahan yang meliputi pemerintahan kelurahan dan nagari, ketertiban, keamanan, penerangan, pers, hukum dan perundang-undangan, kepegawaian, aparatur dan ketenaga kerjaan, perizinan, sosial politik, organisasi kemasyarakatan, pertanahan, kependudukan, agama dan sosial budaya.

Komisi B mempunyai tugas di bidang perekonomian, keuangan dan kesejahteraan, meliputi perdagangan dari dalam dan luar negeri, perindustrian, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pengadaan pangan, logistik, koperasi, keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah, perusahaan patungan, dunia usaha dan penanaman modal, pengelolaan pasar, kesejahteraan rakyat meliputi pendidikan, ilmu dan teknologi, kepemudaan dan olahraga, kesehatan dan keluarga berencana, peranan wanita serta pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan Komisi C bidang pembangunan meliputi pekerjaan umum, tata kota, pertamanan, kebersihan, perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata, lingkungan hidup, perumahan rakyat, pertambangan dan energi, perencanaan pembangunan.

Pada masing-masing tiga komisi tersebut mempunyai jumlah anggota yang berbeda-beda, termasuk juga perbedaan-perbedaan jumlah perempuan dalam masing-masing komisi tersebut. Bahkan khusus di Komisi C tidak ada anggota perempuan dalam komisi tersebut. Tentang jumlah sebaran anggota DPRD di masing-masing Komisi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8.2. Jumlah Anggota DPRD Kota Bukittinggi menurut Komisi dan Jenis Kelamin, Kota Bukittinggi Tahun 2021

No.	KOMISI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L+P
1	I	7	1	8
2	II	7	0	7
3	III	6	1	7
4	Pada masing-masing komisi, pimpinan DPRD (Ketua dan wakil ketua sbg Koordinator)	3	0	3
	TOTAL	23	2	25

Sumber: Setwan Kota Bukittinggi Tahun 2021.

B. Peran dan Komposisi Perempuan di Lembaga Eksekutif

1. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu urat nadi dalam organisasi pemerintahan, karena PNS sebagai penyelenggara pemerintahan. Oleh sebab itu, jumlah PNS yang tersedia secara lengkap dan profesional merupakan salah satu hal yang sangat mendukung terselenggaranya pemerintahan yang berkualitas dan baik. PNS juga berperan sebagai pelayan daripada masyarakat, oleh sebab itu jumlahnya juga sangat menentukan terhadap kualitas layanan tersebut.

Saat ini, di kota Bukittinggi terdapat sebanyak 2486 orang PNS yang akan melayani 121.588 penduduk kota Bukittinggi.

Dari 2486 jumlah PNS yang ada di Kota Bukittinggi, terdapat 1.579 perempuan atau 63,5 % dan 907 orang laki-laki atau 36,5 %. Dengan demikian PNS berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan PNS laki-laki di kota Bukittinggi.

Bila dilihat dari jenis pendidikan terdapat pendidikan terbanyak adalah sarjana S1 (55,5 %) dan S2 sebanyak 9,8 %. Jumlah PNS Kota Bukittinggi menurut pendidikan dan jenis kelamin ini dapat dilihat dengan jelas pada tabel di bawah ini:

Tabel 8.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021

NO	PENDIDIKAN	LAK-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SEKOLAH DASAR	54	2	56
2	SLTP SEDERAJAT	25	2	27
3	SLTA SEDERAJAT	236	111	347
4	DIPLOMA 1	0	2	2
5	DIPLOMA 2	10	22	32
6	DIPLOMA 3	50	255	305
7	DIPLOMA 4	19	16	35
8	S-1	405	1033	1438
9	S-2	108	136	244
10	S-3/DOKTOR	0	0	0
TOTAL		907	1579	2486

Sumber: (BKPSDM) Kota Bukittinggi Tahun 2021

Selanjutnya, jika dilihat lebih rinci jumlah PNS menurut golongan dan jenis kelamin di Kota Bukittinggi maka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya PNS perempuan bergolongan I dan II jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki. Disamping itu, di golongan III dan IV, PNS

perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8.4. Jumlah ASN menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	I	65	4	69
2	II	222	115	337
3	III	470	1116	1586
4	IV	148	344	492
	PPPK	2	0	2
Total		905	1579	2486

Sumber: BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2021

2. Perempuan Menduduki Jabatan Eselon

Pada tahun 2020 PNS yang menduduki jabatan eselon di Kota Bukittinggi berjumlah 551 orang. Dari jumlah tersebut hanya 3 orang yang menduduki eselon II sebagai pengambil kebijakan, dimana laki-laki lebih dominan yaitu 22 orang, padahal jumlah perempuan menjadi PNS di Kota Bukittinggi lebih banyak dari pada laki-laki. Perbandingannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8.5. Jumlah ASN menurut Esselon dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021

NO.	ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	II.a	1	0	1
2	II.b	17	3	20
3	III.a	27	12	39
4	III.b	26	39	65
5	IV.a	74	58	132
6	IV.b	32	83	115
Total		177	195	372

Sumber: BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2021.

3. Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin

Pada tabel 7.6. di bawah terlihat bahwa PNS yang menduduki jabatan Fungsional lebih didominasi oleh perempuan yang tersebar sebagai tenaga pendidik/guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, PLKB dan lain-lain.

Tabel 8.6. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin Tahun 2020.

No.	Jenis PNS	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	ASN Struktural	177	195	372
2	ASN Pelaksana	488	488	976
3	PNS Fungsional Umum	242	896	1138
Total		907	1579	2486

Sumber: BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2021

4. Camat

Di Kota Bukittinggi terdapat tiga kecamatan, yakni kecamatan Guguk Panjang, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan Aur Birugo Tigo Baleh. Masing-masing kecamatan ini dipimpin oleh seorang camat. Untuk ketiga kecamatan tersebut terdapat 2 orang camat laki-laki dan 1 camat Perempuan.

Tabel 8.7. Jumlah Camat di Kota Bukittinggi Tahun 2021

NO	KECAMATAN	L	P	JML
1	Guguk Panjang	1		1
2	Mandiangin Koto Selayan	1		1
3	Aur Birugo Tigo Baleh		1	1
	JUMLAH	2	1	3

Sumber: BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2021

5. Lurah

Di Kota Bukittinggi terdapat 24 kelurahan dari tiga kecamatan. Di kota Bukittinggi hanya ada lurah dan tidak ada nagari, namun sampai tahun 2020 hanya 4 lurah yang perempuan. Dari data diatas tergambar bahwa pada tingkat kepemimpinan terendah (Kelurahan) di Kota Bukittinggi masih di dominasi oleh laki-laki yaitu 88% atau 21 orang. Tapi dari data 31 Desember 2020 terdapat 2 orang lurah yang memasuki usia pensiun (laki-laki). Sebagaimana datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.8. Jumlah Lurah menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Guguk Panjang	7	0	7
2	Mandiingin Koto Selayan	8	1	9
3	Aur Birugo Tigo Baleh	7	1	8
	JUMLAH	22	2	24

Sumber : BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2021.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jabatan-jabatan strategis sampai pada kelurahan di Kota Bukittinggi didominasi oleh laki-laki.

C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif

Representasi perempuan di Lembaga Yudikatif dapat dilihat pada lembaga hukum. Representasi perempuan diperlukan pada lembaga yudikatif karena banyak persoalan hukum yang dialami perempuan belum mendapatkan penanganan dan perlindungan yang adil. Hal ini tidak saja karena jumlah perempuan yang sedikit di lembaga-lembaga penegakan hukum, tetapi juga karena masih kuatnya bias gender di dalam lembaga yang bersangkutan maupun di dalam masyarakat.

1. Jaksa Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Salah satu lembaga yudikatif adalah kejaksaan. Representasi perempuan dapat dilihat pada jumlah perempuan di Kejaksaan seperti pada tabel 8.9 berikut:

Tabel 8.9. Data Ketenagaan pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi Tahun 2021.

No	Jabatan	Tahun 2021	
		Lk	Pr
1.	Jaksa	10	7
2.	Tata Usaha	10	17

Sumber: Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi Tahun 2022.

Tabel diatas memperlihatkan bahwa Jaksa perempuan sudah hampir mendapat posisi yang sama dengan laki-laki.

2. Hakim Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Tabel 8.10. Data Hakim menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020

NO	JABATAN	Jenis Kelamin		
		L	P	Jumlah
1	KETUA	1	0	1
2	WAKIL KETUA	1	0	1
3	HAKIM	2	2	4
4	PANITERA	1	0	1
5	SEKRETARIS	0	1	1
6	WAKIL PANITERA	1	0	1
7	PANITERA MUDA	2	1	3
8	KEPALA SUB BAGIAN	2	1	3
9	PANITERA PENGGANTI	3	5	8
10	JURU SITA	1	1	2
11	JURU SITA PENGGANTI	1	2	3
12	STAF	1	1	2
	JUMLAH	16	14	30

Sumber: Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi Tahun 2020

Tabel 8.10. di atas menunjukkan bahwa Hakim yang ada di Kota Bukittinggi jumlah laki-laki dan perempuan sama.

3. POLRI Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Tabel 8.11. Data Kepolisian menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2021

NO	JENIS KEPANGKATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L+P
1	Ajun Komisaris Besar Polisi	1		1
2	Komisaris Polisi	4		4
3	Ajun Komisaris Polisi	13		13
4	Inspektur Satu Polisi	25	3	28
5	Inspektur dua Polisi	60	4	64
6	AIPTU	64	1	65
7	AIPDA	88	5	93
8	BRIPKA	94	10	104
9	BRIGADIR	58	2	60
10	BRIPTU	22	10	32
11	BRIPDA	20	2	22
	JUMLAH	449	37	486

Sumber: Sunda Polresta Kota Bukittinggi.

Bila dilihat dari data di atas tergambar bahwa perempuan masih relatif sedikit dibandingkan laki-laki. Hal ini berimplikasi terhadap perlindungan perempuan dan anak. Karena sejauh ini realitas menunjukkan bahwa sensitifitas gender terhadap penegak hukum masih relative rendah. Oleh karena itu tidak jarang kasus-kasus yang menimpa perempuan karena kepengurusannya kurang diperhatikan secara optimal.

D. Pengurus Organisasi Sosial, Kemasyarakatan dan Politik

1. Data Organisasi Sosial, Kemasyarakatan dan Politik

Maraknya organisasi-organisasi perempuan, organisasi sosial, kemasyarakatan dan forum-forum yang beranggotakan perempuan merupakan salah satu indikator bahwa potensi perempuan sangat besar dan mempunyai peluang untuk mengembangkan diri dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya peranan perempuan disegala aspek kehidupan. Organisasi perempuan merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi organisasi perempuan khususnya dalam bidang pembangunan yang berkeadilan haus dimulai dari komitmen yang tinggi melalui manajemen yang diterapkan serta peningkatan kinerja individu pada organisasi tersebut, apabila organisasi atau kelompok-kelompok perempuan yang tergabung dalam wadah organisasi kemasyarakatan terkelola dengan baik maka pembangunan pemberdayaan perempuan akan lebih eksis dan lebih optimal.

Tabel 8.12. Data Organisasi Mitra Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	Nama Organisasi	Nama Pimpinan/Ketua	Alamat
1	Dharmawanita	Ny. Eva Martias Wanto	Jl. Sudirman No 27-29
2	Adhyaksa Dharmakarini	Ny. Novia Sukardi	Kantor Kejaksaan
3	Dharmayukti Karini.	Ny. Tuti Sofyan	Kantor Pengadilan Negeri
4	Bhayangkari	Ny. Ama Dody	Polres Kota Bukittinggi
5	Persit Chandra Kirana	Ny. Hizrah Brozti Dadi	Kodim 0304
6	Ikatan Kartini Profesional Indonesia	Ny. Emmalinda Chaidir	Jl. Sudirman Birugo.

	(IKAPRI) Kota Bukittinggi.		
7	Perwira	Tuti Suryani Sofyan,SH	Jl.Guru Hamzah No 1 Tarok Dipo
8	Forum Bundo Kota Bukittinggi.	Ny. Elfianis	Kel. Puhun Tembok.
9	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bukittinggi.	Ny. Fiona Erman Safar.	Jl. Perwira Belakang Balok.
10	Bundo Kandung (BK)	Ny. Efni, S.Pd	Jirek, Kel. Puhun Pintu Kabun.
11	Persatuan Wanita Kurai (PWK) Kota Bukittinggi.	Ny. Zulzetri, M.Pd	Pulai, Kel. Pulai Anak Air.
12	Pusat Kajian Wanita (PKW) Kota Bukittinggi.	DR. Silvia Hanani	IAIN Kubang Putih.
13	Ikatan Istri Pegawai Bank Daerah (ISBANDA) Kota Bukittinggi.	Ny.Yanti Tasman	Bank Nagari
14	Ikatan Istri Pegawai Bank Rakyat Indonesia (IWABRI) Kota Bukittinggi.	Ny. Hari Prasetyo	BRI Cabang Bukittinggi
15	Ikatan Istri Dokter Indonesia (IID) Kota Bukittinggi.	Lelliwati	Gurun Aur 248 Kubang Putih.
16	Perempuan Wanita Islam	Dr.Rahmi Yetti,SpA	Jl.Pemuda No 06
17	Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Bukittinggi	Paulina, S.ST	Tengah Jua
18	Salimah	Selvika Wijaya,SE	Jl. Haji Miskin
19	Aisyiah	Hj.Ermiami	Jl.Perintis Kemerdekaan No 28
20	Badan Penyantun Yarsi Sumbar perwakilan Bukittinggi	Dr.Hj.Rahmi Yetti, SpA	RSI Ibnu Sina Bukittinggi
21	IWAPI	Hj.Arifah Inas	Jl.Perwira No 1
22	Muslimah NU	Misra Elvi	

23	WHBT	Lana Stiawati, SE,MBA	Jl.Jenderal A Yani
----	------	--------------------------	--------------------

2. Pengurus Harian Partai Politik

Di dalam kepengurusan harian partai politik, perempuan sudah mulai terlihat berperan, walaupun jumlahnya masih di bawah laki-laki.

Tabel 8.13. Jumlah Pengurus Harian Partai Politik Menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2021.

No	Parpol	No. SK/ Tanggal	Laki-laki	Perempuan	Jml
1	PPP	05/SK/DPW/C/XII/2016, 1 Desember 2016	27	14	41
2	Golkar	005/4/GKSD/VIII/2016 22 Agustus 2016	42	22	64
3	Gerindra	09-0143/Kpts/DPP GERINDRA/2012, 1 September 2012	36	19	55
4	Nasdem	589-SK/DPP-NASDEM/XI/2013	53	38	91
5	PDIP	24.05/KPTS/DPC/DPP/III/2015 7 Maret 2015	9	7	16
6	Demokrat	/SK/DPP.PD/DPC/VIII/2012	14	7	21
7	Hanura	SKEP/025/DPDSB/ HANURA/VIII/2016, 19 Agustus 2016	13	9	22
8	PKS	074/D/SKEP/AC00-PKS/1432, 2 Mei 2016	5	1	6
Jumlah			199	117	316

3. Kaukus Perempuan Politik

SK. KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) dengan Nomor SK. Walikota Bukittinggi Nomor 476/671/DP3APPKB/VII-18 tanggal Juli 2018, tentang Pembentukan Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kota Bukittinggi Periode 2018-2022.

BAB IX

BIDANG HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

Semua orang sama didepan hukum dan hukum harus ditaati bukan untuk dilanggar. Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Karena Konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila maupun UUD 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut dan diratifikasi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Disini jelas terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan, ditambah lagi komitmen khusus yakni perlindungan terhadap deskriminasi, dan bahkan terhadap deskriminasi itu sendiri.

Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) dengan mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki. Berdasarkan deklarasi ini komisi PBB tentang Kedudukan Perempuan menyusun rancangan konvensi tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut dan diratifikasi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan. Disini jelas terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan.

A. Kasus Kriminalitas yang ditangani

Kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi Tahun 2020 adalah sebagai berikut ;

Tabel 9.1. Jumlah Kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi Tahun 2020

Kasus	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pencurian	48	2	50
Asusila	8	0	8
Pembunuhan	1	0	1
Narkoba	51		51
Penganiayaan	23		23
Lainnya	23	3	26
Total	159	5	164

Sumber : Kejaksaan Negeri Bukittinggi Tahun 2021

Tabel diatas memperlihatkan bahwa kasus kriminal yang ditangani kejaksaan pada umumnya adalah laki-laki, dan terdapat 5 kasus yang ditangani perempuan.

B. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Bukittinggi

1. Anak Terlantar

Anak terlantar sesuai dengan Permensos No. 08 Tahun 2012, merupakan seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Jumlah Anak terlantar di Kota Bukittinggi sejak tahun 2018 mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat pada gambar berikut .

Gambar 9.1. Jumlah Anak Terlantar Tahun 2018 sd 2021 di Kota Bukittinggi



2. Anak yang ditampung di Panti Asuhan

Tabel 9.2. Jumlah Anak yang Ditampung di Panti Asuhan di Kota Bukittinggi Tahun 2017, sampai dengan 2021

No	Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bukittinggi	94	94	96	96	107

Sumber : Dinsos Kota Bukittinggi Tahun 2021

3. Bekas Warga Binaan lembaga pemasyarakatan

Tabel 9.3. Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017s/d 2021

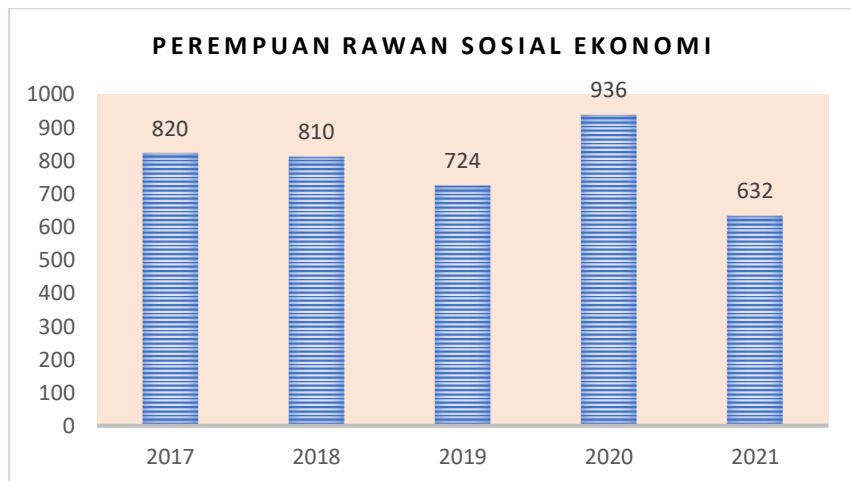
No	Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bukittinggi	15	-	2	0	7

Sumber: Dinsos Kota Bukittinggi Tahun 2021.

Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Permensos No 08 Tahun 2012, merupakan seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri, kemabli dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau menjalani kehidupan secara normal. Menurut tabel diatas, jumlah bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) tahun 2020 tidak ada.

4. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Gambar 9.2 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2016 sd 2021



Dari grafik diatas terlihat adanya penurunan jumlah wanita rawan sosial ekonomi sampai dengan tahun 2019, akan tetapi disebabkan karena adanya pandemic Covid 19, maka terjadi peningkatan di tahun 2020.

5. Penyandang Disabilitas

Disabilitas merupakan kondisi pembatasan aktivitas dikarenakan adanya keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Penderita disabilitas akan mengalami hambatan dan

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan lingkungan sekitar berdasarkan kesamaan hak Terdapat empat jenis disabilitas yaitu:

- Disabilitas fisik: Amputasi, lumpuh, paraplegi, stroke, disabilitasakibat kusta, *cerebral palsy* (CP).
- Disabilitas intelektual: *Down syndrome*, kretinisme, mikrosefali, makrosefali, dan skafosefali.
- Disabilitas mental: Skizofrenia, demensia, afektif bipolar, retardasi mental.
- Disabilitas sensori: disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara.

Pengertian disabilitas ini memang cukup kompleks dan menggambarkan interaksi antara gerakan tubuh seseorang dengan orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya.

Tabel 9.4 Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2021

No	Kecamatan	Penyandang Disabilitas
1	Guguk Panjang	23
2	Mandiingin Koto Selayan	38
3	Aur Birugo Tigo Baleh	37
Total		98

Sumber: Bukittinggi dalam Angka Tahun 2022

Jumlah penyandang disabilitas Di Kota Bukittinggi Tahun 2021 adalah sebanyak 98 orang yang masih tergolong anak-anak.

6. Jumlah Pekerja Sosial, Karang Taruna, Tenaga Kerja Sosial di Kota Bukittinggi Tahun 2021

Tabel 9.5. Tabel Jumlah Pekerja Sosial, Karang Taruna, Tenaga Kerja Sosial di Kota Bukittinggi Tahun 2021

No	Kecamatan	Pekerja Sosial	Karang Taruna	Tenaga Kerja Sosial	Organisasi Sosial
1	Guguk Panjang	39	27	1	10
2	Mandiingin Koto Selayan	56	28	1	5
3	Aur Birugo Tigo Baleh	35	28	1	3
	JUMLAH	130	83	3	18

Sumber : Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2022

BAB X

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pengesahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah berlangsung selama 14 tahun dan telah diimplementasikan dalam pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan. Undang-Undang tersebut memberi mandat kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), untuk bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perumusan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang kekerasan dalam rumah tangga; sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sensitif gender, serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Selain itu Peraturan presiden republic Indonesia nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan , bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasarkan atas hokum upaya yang dilakukan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan perlu diwujudkan secara nyata.

Mayoritas yang menjadi korban kekerasan didalam rumah tangga adalah perempuan dan anak. Baik perempuan yang berstatus sebagai istri, anak, maupun pembantu rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan tindak pidana perdagangan orang.

A. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Tabel 10.1. Korban kekerasan terhadap perempuan menurut umur di kota Bukittinggi Tahun 2021

No	Kecamatan	Kelompok Umur			TOTAL
		0-<18	18->25	>25	
1	Guguk Panjang	1	1	4	6
2	Mandiingin K.Selayan	0	2	6	8
3	Aur Birugo Tigo Baleh	0	0	2	2
	JUMLAH	1	3	12	16

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas yang menjadi korban kekerasan yang banyak adalah pada usia lebih dari 25 tahun . Bila dilihat rentang usia korban ini, maka disimpulkan korban merupakan kategori orang dewasa. Kasus tersebar di ketiga kecamatan.

Kekerasan terhadap perempuan saat ini masih terjadi dalam berbagai bentuk dan modus yang tidak banyak mengalami perubahan dari tahun tahun sebelumnya. Akan tetapi belum didapatkan data yang akurat sesuai dengan yang terjadi di lapangan, karena stigma yang terjadi pada masyarakat adalah rasa malu apabila mengadukan permasalahan kepada orang lain, sehingga kasus kekerasan khususnya yang terjadi di rumah tangga tidak dilaporkan ke pihak yang berwenang.

Bila dilihat dari tingkat pendidikan, terlihat pada table 10.2 dibawah, bahwa korban juga dialami oleh yang memiliki tingkat pendidikan cukup tinggi.

Tabel 10.2. Korban kekerasan terhadap perempuan menurut tingkat pendidikan di Kota Bukittinggi Tahun 2021.

No	Kecamatan	Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat Sekolah	SD	SLTP	SLTA	PT
1	Guguk Panjang	0	0	1	1	3	0
2	Mandiingin K.Selayan	0	0	2	1	3	2
3	Aur Birugo Tigo Baleh	0	0	1	0	1	1
	JUMLAH	0	0	4	2	7	3

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Terlihat pada tabel diatas bahwa perempuan korban kekerasan terjadi penyebaran ditiap tingkat pendidikan SD, SLTP SLTA dan Perguruan Tinggi, yang berarti tindak kekerasan di Kota Bukittinggi tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh factor intelektual/ kebodohan, tentunya banyak factor lain yang mempengaruhinya, seperti factor emosional, ekonomi dan hal-hal lainnya.

Tabel 10.3. Korban kekerasan terhadap perempuan menurut Status Pekerjaan di Kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Berusaha sendiri	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	Buruh / Karyawan/ Pegawai	Pekerjaan bebas di Pertanian	Pekerjaan bebas di Non Pertanian	Pekerjaan Keluarga	Pelajar/ lain-lain
1	G. Panjang	1	0	2	0	0	0	3
2	Mandiingin K.Selayan	2	0	0	0	0	0	6
3	Aur Tigo Baleh	0	0	0	0	0	0	2
	JUMLAH	3	0	2	0	0	0	11

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan terjadi berstatus pelajar dan buruh/ karyawan

/pegawai. Pelajar menjadi korban kekerasan pada umumnya disebabkan karena :

- anak terutama pelajar cenderung tidak akan mengadukan kekerasan yang di alami karena khawatir akan menjadi pihak yang disalahkan.
- Anak sekolah mudah terpengaruh dengan bujuk rayu orang dewasa
- Tingkat ketakutan yang tinggi terhadap orang dewasa
- Penyalahgunaan gadget pada anak
- Mudah dibujuk rayu dengan pemberian uang atau hadiah
- Belum punya pengetahuan dan memahami tentang pendidikan seks
- Kurangnya pengawasan orang tua dan keluarga
- Kurangnya pengetahuan agama dalam keluarga.

Tabel 10.4. Korban kekerasan terhadap perempuan menurut status perkawinan di Kota Bukittinggi Tahun 2021

No.	Kecamatan	Belum Kawin	Kawin	Cerai Mati	Cerai hidup
1	Guguk Panjang	2	3	0	1
2	Mandiangan K.Selayan	4	4	0	0
3	Aur Birugo Tigo Baleh	0	1	0	1
	JUMLAH	6	7	0	2

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel di atas yang menjadi korban kekerasan terdiri atas korban yang berstatus kawin dan belum kawin.. Hal ini menggambarkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan banyak berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan jenis kekerasan dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 10.5. Korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kekerasan di Kota Bukittinggi Tahun 2021.

No.	Kecamatan	Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	Lainnya
1	Guguk Panjang	0	3	0	0	1	2
2	Mandiingin K.Selayan	1	4	1	0	0	2
3	Aur Birugo Tigo Baleh	0	0	1	0	0	1
	JUMLAH	1	7	2	0	1	5

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Tabel di atas menunjukkan sebagian besar kekerasan yang dialami perempuan adalah kekesarasan Psikis, Kekerasan psikis merupakan bentuk lain dari kekerasan dalam rumah tangga ([KDRT](#)) dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Jadi, KDRT tidak hanya kekerasan fisik penganiayaan dan semacamnya.

KDRT didefinisikan sebagai, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan [hukum](#) dalam lingkup rumah tangga. Di sini ada empat macam KDRT dan kekerasan psikis termasuk diantaranya.

Kekerasan psikis dapat berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU PKDRT).

Tabel 10.6. Korban kekerasan terhadap perempuan menurut Tempat kejadian di kota Bukittinggi Tahun 2020

No	Kecamatan	Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya
----	-----------	--------------	--------------	---------

1	Guguk Panjang	4	0	2
2	Mandiingin K.Selayan	6	1	1
3	Aur Birugo Tigo Baleh	1	0	1
	JUMLAH	11	1	4

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan lebih sering terjadi di rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah segala bentuk ancaman, pelecehan, dan kekerasan antara dua orang yang terikat dalam hubungan pernikahan atau anggota keluarga lain, misalnya anak. Ini merupakan salah satu bentuk hubungan *abusive* dan *toxic* yang cukup sering terjadi.

Siapa pun berpeluang menjadi pelaku atau korban KDRT. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar korban KDRT di Indonesia adalah wanita. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa sekitar 30 persen wanita Indonesia pernah mengalami KDRT, bahkan beberapa kasus KDRT dialami oleh wanita hamil.

Selain itu, meski kekerasan dalam rumah tangga hanya terjadi dalam hubungan suami-istri dan tidak terjadi pada anak, tetapi anak yang menyaksikan kekerasan berisiko tumbuh menjadi pribadi yang juga suka melakukan kekerasan.

Anak yang sering menyaksikan kekerasan berisiko mengalami [gangguan psikis](#), perilaku agresif, dan rendah diri.

Tabel 10.7. Korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis Pelayanan di kota Bukittinggi Tahun 2021.

No	Kecamatan	Penanganan pengaduan	Pelayanan kesehatan	Rehabilitasi sosial	Penegakan & bantuan hukum	Pemulangan & reintegrasi
1	Guguk Panjang	2	3	0	1	0
2	Mandiingin K.Selayan	6	2	0	0	0
3	Aur Birugo Tigo Baleh	1	1	0	0	0
	JUMLAH	9	6	0	1	0

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Dari 16 orang yang datang ke P2TP2A , semua sudah dilaksanakan penanganan kasus.

Tabel 10.8. Korban kekerasan terhadap perempuan menurut Frekuensi Kekerasan di kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Frekuensi Kekerasan		
		Baru	Berulang	Rujukan
1	Guguk Panjang	5	1	0
2	Mandiingin K.Selayan	8	0	0
3	Aur Birugo Tigo Baleh	2	0	0
	JUMLAH	15	1	0

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Para korban perempuan yang melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, didominasi oleh kasus baru. Sehingga, mereka hanya melaporkan kejadiannya sekali dan dilanjutkan dengan konsultasi lanjutan. Pelaporan biasanya dilakukan setelah terjadi kekerasan fisik maupun psikis yang berulang. Saat perempuan itu sudah benar-benar tidak sanggup lagi menanggung kekerasan, mereka baru melaporkan kepada P2TP2A.

Tabel 10.9. Pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut Tingkat Pendidikan di kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan					
		Tidak/ belum sekolah	Belum Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	PT
1	Guguk Panjang	0	0	1	1	3	0
2	Mandiingin K.Selayan	0	0	2	1	3	2
3	Aur Birugo Tigo Baleh	0	0	1	0	1	1
	JUMLAH	0	0	4	2	7	3

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Tabel diatas memperlihatkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh orang yang juga berpendidikan, yang berarti bahwa pemicu terjadinya kekerasan adalah adanya factor lain .

Terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan yaitu faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi.

B. Kekerasan Terhadap Anak

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak adalah buah hati yang tak ternilai harganya bagi sebuah keluarga, maka dari itu menjaganya untuk tumbuh baik dan berkembang sebagaimana yang diharapkan adalah merupakan kewajiban mutlak bagi kedua orang tua yaitu ayah dan ibu. Bagaimana memilih pendidikan yang baik, pergaulan yang baik, lingkungan yang mendukung sudah sepantasnya orang tua wajib mengarahkan anak.

Tabel 10.10. JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT JENIS KEKERASAN DAN JENIS KELAMIN, PER KECAMATAN DI KOTA BUKITTINGGI

No	KEC	2021											
		JENIS KEKERASAN											
		FISIK		PSIKIS		SEKSUAL		EKSPLOITASI		PENELANTARAN		LAINNYA	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Guguk Panjang	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	3
2	Mandiangan K.Selayan	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	9	6
3	Aur Birugo Tigo Baleh	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	4	2
JUMLAH		2	1	1	2	3	3	0	0	1	0	14	11

Sumber : P2TP2A Kota Bukittinggi

Kekerasan pada anak biasanya terjadi secara Fisik, psikis dan sexual, penelantaran dan lainnya. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi terhadap anak, adalah:

- 1) Kekerasan fisik; yang termasuk kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat tubuh yang menyebabkan kematian ataupun tidak. Bentuk-bentuknya antara lain memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/senjata, membunuh.
- 2) Kekerasan psikologi/mental; kekerasan ini meliputi perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya, seperti berteriak-teriak, mengancam, merendahkan, menyumpah serapah, melecehkan, menguntit, dan memata-matai serta tindak-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut yang ditujukan kepada korban atau keluarga dekatnya.
- 3) Kekerasan ekonomi; kekerasan ini adalah setiap perbuatan yang mengeksploitasi anak atau menelantarkan anggota keluarga, misalnya kelalaian memberikan kebutuhan hidup seperti makan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan sebagainya.
- 4) Kekerasan seksual; kekerasan mencakup pelecehan seksual sampai memaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, bentuk-bentuk tersebut misalnya menyentuh, meraba, mencium, memaksa korban melihat pornografi, ucapan yang merendahkan, melecehkan atau menyakiti korban. Untuk kekerasan seksual ini, si pelaku biasanya orang dekat yang nekat melakukannya.

Tabel. 10.11. Lembaga Layanan Yang Menangani Anak Korban Kekerasan, Per Kecamatan Di Kota Bukittinggi Tahun 2021

N o.	KECAMATAN	R P T C	L B H	P K T	P P T	U P P A	TRAUMA CENTER	WOMAN CRISIS CENTER	SHELT ER	RUMAH SINGGAH	RPS A	PANTI ASUAHAN ANAK	P2TP 2A
1	Guguk Panjang	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8
2	MKS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
3	Aur Birugo Tigo Baleh	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9
JUMLAH		0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	45

Sumber : P2TP2A Kota Bukittinggi

P2TP2A adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak korban kekerasan, melalui wahana operasional pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah daerah. Di antara upaya yang dilakukan adalah pelayanan pelaporan/pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulihan korban secara pelayanan bantuan dan penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, pendampingan tokoh agama, konsultasi dan berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak.

Kota Bukittinggi adalah kota terbesar kedua di Sumatera Barat. Selain itu, Bukittinggi juga menjadi pusat perdagangan dan wisata. Ini jelas berdampak pada kompleksnya persoalan sosial kemasyarakatannya. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mencoba hadir dan memberi jalan keluar dalam persoalan pemberdayaan perempuan dan anak. Pada akhir tahun 2009 P2TP2A Saayun Salangkah didirikan di Kota Bukittinggi, yang operasionalnya dimulai pada tahun 2010.

Tabel 10.12. Jumlah Korban Kekerasan Pada Anak per Kecamatan Kota Bukittinggi
Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JENIS PELAYANAN YANG DIBERIKAN									
		PENANGANAN PENGADUAN		PELAYANAN KESEHATAN		REHABILITASI SOSIAL		PENEGAKAN DAN BANTUAN HUKUM		PEMULANGAN & REINTEGRASI	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Guguk Panjang	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0
2	Mandiingin K.Selayan	10	6	5	2	0	0	0	0	0	0
3	Aur Birugo Tigo Baleh	4	2	0	2	0	0	1	0	0	0
JUMLAH		15	11	7	5	0	0	1	0	0	0

Sumber : P2TP2A Kota Bukittinggi

Dampak kekerasan terhadap anak, apa pun tujuannya, sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Kita bisa melihatnya dari penelitian UNICEF yang mengumpulkan dan menyusun berbagai dampak perlakuan kejam terhadap anak. Penyusunan itu kemudian digolongkan ke dalam empat area, yaitu kesehatan fisik, kesehatan mental, keluaran kekerasan, dan dampak terhadap pendidikan dan ketenagakerjaan.

BAB XI

INDEKS KUALITAS KELUARGA

Tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam jangka menengah dan panjang adalah pencapaian target seperti Indonesia Sejahtera Tahun 2025 dan Generasi Emas Tahun 2045. Adanya fakta kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki, dan juga anak perempuan dan anak laki-laki menunjukkan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender menunjukkan bahwa ketahanan keluarga belum tercapai dengan baik. Berbagai macam studi menyatakan bahwa keluarga merupakan bagian yang sangat penting dalam berkontribusi terhadap permasalahan masyarakat.

Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Sejalan dengan undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga maka ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan system yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan non fisik) proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan out put (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial). Dengan demikian keluarga dikatakan memiliki ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek , yaitu :

1. Ketahanan fisik yaitu terpenuhiya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, Pendidikan dan Kesehatan
2. Ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi
3. Ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap isteri.

IKK menjadi tolok ukur peningkatan Kualitas Keluarga suatu wilayah dengan kategori nilai indeks antara 0,00 sampai 100 dengan kategori indeks sebagai berikut:

1. IKK yang “kurang responsif Gender dan Hak Anak” apabila nilai kurang atau di bawah 50;
2. IKK yang “cukup responsif Gender dan Hak Anak” apabila nilai antara 50-75;
3. IKK yang “responsif Gender dan Hak Anak” apabila nilai di atas 75.

IKK merupakan suatu pengukuran komposit dari Kualitas Keluarga yang ditunjukkan melalui pencapaian atas 5 (lima) dimensi dan 29 (dua puluh sembilan) indikator, yaitu:

1. dimensi kualitas legalitas dan struktur, terdiri atas 3 (tiga) indikator;
2. dimensi kualitas ketahanan fisik, terdiri atas 6 (enam) indikator;
3. dimensi kualitas ketahanan ekonomi, terdiri atas 8 (delapan) indikator;
4. dimensi kualitas ketahanan sosial psikologi, terdiri atas 6 (enam) indikator;
5. dimensi kualitas ketahanan sosial budaya, terdiri atas 6 (enam) indikator

Berikut adalah hasil survey IKK yang dilaksanakan di Bukittinggi Tahun 2021 yang diberikan questioner kepada peserta sekolah keluarga, yang tersebar di 24 kelurahan yang ada di Bukittinggi. dengan jumlah 648 sampel

Dari hasil oleh data diperoleh hasil IKK sebesar **74,35** yang termasuk kategori **Indeks Ketahanan Keluarga Tinggi**.

Adapun uraian dari hasil survey tersebut adalah :

DIMENSI 1. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Dimensi 1 terdiri atas 3 indikator yakni : landasan legalitas, keutuhan keluarga dan Kemitraan Gender.

Adapun hasil dari pengolahan data diperoleh sebagai berikut :

No	Pertanyaan	Jawaban	%
----	------------	---------	---

1	Apakah Bapak dan Ibu memiliki surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA atau Catatan Sipil? (legalitas perkawinan)	631	97,38
2	Apakah semua anak memiliki akte kelahiran? (legalitas kelahiran)	629	97,07
3	Apakah semua anggota keluarga (suami isteri dengan atau tanpa anak) tinggal dalam satu rumah?, suami tidak pisah ranjang, boleh pisah sementara apabila suami/ istri bekerja diluar rumah (keutuhan keluarga)	519	80,09
4	Adakah Ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak (minimal 2 jam perhari)? (kebersamaan dlm keluarga)	430	66,36
5	Adakah Ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak? (kebersamaan dlm keluarga)	430	66,36
6	Apakah Suami isteri bersama-sama mengelola secara terbuka keuangan keluarga? (keterbukaan pengelolaan keuangan)	564	87,04
7	Apakah Suami isteri merencanakan bersama-sama jumlah anak yang diinginkan atau alat kontrasepsi yang dipakai? (pengambilan keputusan keluarga)	533	82,25
8	Apakah istri bekerja? (kemitraan suami-istri)	175	27,01
9	Apakah ayah dan atau ibu bekerjasama dalam mendampingi anak menyelesaikan tugas sekolah saat kondisi Covid-19? (kemitraan suami-istri)	506	78,09

Berdasarkan table Dimensi 1 terlihat bahwa yang belum memiliki legalitas perkawinan dan legalitas anak masing-masing sebanyak 3 %.

Pencatatan perkawinan dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perkawinan dan memberikan perlindungan serta menjamin

terpenuhinya hak-hak sipil dan sosial pasangan suami istri dan anak yang lahir dari perkawinan itu. Tanpa ada surat/akta nikah maka akan memperlemah posisi perempuan dan anakanak secara hukum

Akta kelahiran merupakan pencatatan kelahiran yaitu pengakuan formal seorang anak dalam hukum sehingga mengamankan Hak Anak misalnya identifikasi anak. Akta kelahiran berfungsi sebagai kebutuhan dasar untuk mendaftar sekolah, mulai dari Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi, membuat Kartu Tanda Penduduk, melamar pekerjaan, urusan terkait pemilikan tanah, dan pencatatan perkawinan. Tanpa ada akta kelahiran maka akan memperlemah posisi anak secara hukum.

Langkah yang diperlukan adalah dengan melaksanakan Sidang Istbath nikah bagi pasangan yang telah memenuhi persyaratan dan perkawinan sah menurut agama, serta pengesahan asal usul anak yang disidangkan oleh Pengadilan Agama.

Hasil survey IKK ini juga memperlihatkan bahwa hanya 66,36% dari ayah ataupun ibu yang menyisihkan waktu khusus untuk anaknya. Ketersediaan waktu orang tua serta komunikasi terhadap anak sangat besar pengaruhnya untuk pemebentukan karakter anak. Hal ini sejalan dengan pendapat seorang profesor psikologi dari Sam Houston State University, Rowland S. Miller, yang di dalam bukunya menegaskan bahwa komunikasi yang dipupuk oleh keluarga secara rutin akan menghasilkan kedekatan emosional yang semakin dalam.

Dari survey IKK yang dilaksanakan pada tahun 2021, terlihat bahwa untuk indicator kemitraan keluarga, keterbukaan pengelolaan keuangan keluarga sudah dilaksanakan oleh 87 %. Angka ini menggambarkan bahwa kemitraan gender sudah terlaksana dengan kategori baik.

DIMENSI 2: Ketahanan Fisik

No	Pertanyaan	Jawaban	%
----	------------	---------	---

1	Apakah semua anggota keluarga mampu makan lengkap (nasi, sayur, tempe, tahu, buah) dua kali per hari?	275	42,44
2	Apakah Ada anggota keluarga yang menderita masalah gizi (kurus sekali atau gemuk sekali atau kerdil/kuntet) ?	613	94,60
3	Apakah Ada anggota keluarga yang menderita penyakit akut/ kronis (kencing manis, darah tinggi, jantung , stroke, ginjal, lumpuh, paru-paru, asma, radang otak, kaki gajah, types, DBD, Diare) atau cacat bawaan?	524	80,86
4	Apakah rumah yang ditempati memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak? Ruang tidur terpisah berarti dipisahkan oleh dinding permanen atau sekat darurat/sementara.	580	89,51

Untuk dimensi ketahanan fisik terlihat bahwa indicator-indikatornya sudah masuk kategori tinggi, kecuali mengkonsumsi makanan lengkap minimal 2 kali sehari. Hal ini disebabkan pola kebiasaan makan masyarakat yang lebih cenderung untuk tidak memakai pola makan lengkap (nasi, sayur, tempe, tahu, buah) setiap hari minimal 2 kali.

Untuk meningkatkan konsumsi menu lengkap, maka pola kebiasaan masyarakat hendaklah perlu adanya sosialisasi yang lebih gencar supaya lebih mengutamakan makanan yang bervariasi beraneka ragam dan sehat, terutama lebih meningkatkan konsumsi buah dan sayuran.

Frekuensi makan yang baik yaitu 3 (tiga) kali dalam sehari dan lengkap zat gizinya, apabila tidak tercapai maka akan terjadi kekurangan zat gizi terutama anak-anak. Tanpa makan lengkap 2 (dua) kali per hari maka berdampak Keluarga menjadi rentan dari sisi kesehatan

Penyakit yang dialami anggota Keluarga dan disabilitas menjadikan Keluarga rentan dari sisi kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu indikator utama dari kualitas sumber daya manusia

DIMENSI 3: Ketahanan Ekonomi

No	Pertanyaan	Jawaban	%
1	Apakah Keluarga memiliki rumah? Memiliki rumah berarti milik sendiri, meskipun tidak harus dengan sertifikat	337	52,01
2	Apakah Suami/isteri mempunyai penghasilan tetap per bulan sebesar Rp. 455.000 per orang per bulan?	341	52,62
3	Apakah Keluarga pernah menunggak membayar listrik?	491	75,77
4	Apakah Keluarga pernah menunggak membayar iuran atau keperluan pendidikan anak? artinya pernah kesulitan memenuhi keperluan pendidikan (seperti ongkos, jajan, baju sekolah, dll)	367	56,64
5	Apakah ada anak yang putus sekolah?	600	92,59
6	Apakah Suami dan/atau isteri mempunyai tabungan dalam bentuk uang minimal Rp 2.100.000 ?	196	30,25
7	Adakah Anggota keluarga memiliki asuransi kesehatan (BPJS) atau lainnya, minimal 1 orang?	552	85,19

Jika dilihat dari dimensi Ketahanan Ekonomi, ternyata hampir sebagian dari responden belum memiliki rumah, sedangkan memiliki rumah merupakan kebutuhan dasar Keluarga sehingga merupakan simbol keamanan Keluarga. Tanpa memiliki rumah, anggota Keluarga menjadi berpindah-pindah dan rentan terhadap keutuhan Keluarga.

Penghasilan merupakan salah satu persyaratan utama dalam Keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan Keluarga berpengaruh positif terhadap kesejahteraan Keluarga. Tanpa memiliki

penghasilan maka berdampak Keluarga menjadi rentan dari sisi fisik, ekonomi, sosial psikologi, dan sosial budaya yang dapat berdampak pada konflik perceraian Keluarga.

Dari keluarga yang menjadi responden ternyata pernah menunggak membayar iuran atau keperluan pendidikan anak. Menunggak iuran pendidikan akan mengganggu kelancaran urusan pendidikan anak, membuat anak kurang kepercayaan diri, kurang semangat sekolah sehingga dapat menurunkan nilai akademis anak di sekolah

Istri bekerja mencerminkan posisi perempuan dalam Keluarga karena mempunyai kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi Keluarga. Hal ini menandakan adanya Kesetaraan Gender dalam kontribusi ekonomi dalam Keluarga. Istri yang tidak bekerja menandakan kerentanan perempuan dalam kontribusi menghasilkan pendapatan dalam Keluarga.

DIMENSI 4: Ketahanan Sosial Psikologi

No	Pertanyaan	Jawaban	%
1	Adakah terjadi kekerasan antar suami dan isteri ? (saling berteriak menggunakan kata-kata kasar, menghina, merendahkan/ mempermalukan, memukul/ mendiamkan lebih dari 3 hari pasangan satu sama lain, pisah ranjang)	413	63,73
2	Adakah terjadi kekerasan antar orang tua dan anak?	540	83,33
3	Adakah anggota keluarga yang terlibat masalah (spt: mencuri, tauran, berkelahi, memalak, narkoba, ditilang SIM, melanggar lalu lintas, memukul dll)	618	95,37
4	Apakah rekreasi diputuskan bersama oleh suami-istri dan anak (jika ada)?	268	41,36

Dari table diatas terlihat, bahwa terjadi kekerasan antar suami dan isteri (saling berteriak menggunakan kata-kata kasar, menghina, merendahkan/

mempermalukan, memukul/ mendiamkan lebih dari 3 hari pasangannya). 63,73 % responden.

Kekerasan antar suami dan istri dapat memicu perceraian dan trauma bagi seluruh anggota Keluarga. Adanya kekerasan antar suami dan istri maka berdampak Keluarga menjadi rentan dari sisi sosial psikologi dan dari sisi fisik.

Untuk indicator pelaksanaan rekreasi terlihat hanya 41,36 % yang melaksanakan rekreasi. Rekreasi bersama Keluarga berdampak pada peningkatan interaksi, ikatan, keeratn (bonding), dan komunikasi anggota Keluarga serta penyegaran jasmani dan rohani seluruh Keluarga. Tanpa rekreasi bersama, maka Keluarga cenderung stres, dan rentan dari sisi sosial psikologi.

DIMENSI 5: Ketahanan Sosial Budaya

No	Pertanyaan	Jawaban	%
1	Apakah anggota keluarga memberikan perhatian dan merawat orang tua lanjut usia diatas 60 tahun?	403	62,19
2	Apakah Anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti pengajian, posyandu, kerja bakti, kematian, kelahiran, ronda, kesenian, penyuluhan, pelatihan?	350	54,01
3	Apakah Anggota keluarga melakukan kegiatan agama secara rutin?	340	52,47
4	Apakah keluarga memiliki akses informasi dari media cetak, media elektronik, atau media online?	520	80,25

Perhatian dan merawat orang tua lanjut usia di atas 60 tahun merupakan akan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan lanjut usia. Tanpa merawat orang tua lanjut usia maka berdampak Keluarga menjadi rentan dari sisi sosial budaya. Pada lanjut usia perempuan, mereka menjadi kelompok yang berpotensi tinggi mengalami diskriminasi ganda karena statusnya sebagai perempuan dan sebagai kelompok lanjut usia. Keluarga sangat berperan dalam melindungi lanjut usia dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan buruk.

Ibadah mempengaruhi positif terhadap kesehatan mental individu dan psikis/mental Keluarga dan masyarakat. Tanpa kegiatan agama dikhawatirkan kesehatan mental individu dan Keluarga menjadi rentan dari dimensi sosial psikologi dan sosial budaya serta tidak mampu berperilaku sosial yang positif.

Keluarga generasi milenial menggunakan teknologi sebagai alat penunjang kegiatan sehari-hari. Anak yang tidak didampingi oleh orang dewasa dalam menggunakan media sosial online dikhawatirkan menjadi kecanduan media sosial, bermain game online, dan membuka situs pornografi. Mendampingi anak dalam menggunakan media sosial online merupakan bentuk perlindungan Hak Anak atas aspek sosial psikologi dan sosial budaya.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan dan data yang telah dikemukakan pada Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2022, terdapat beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap penilaian keadilan dan kesetaraan gender antara lain:

1. Ketersediaan data

- a. Ketersediaan data sangat penting dalam menyusun suatu analisa yang tepat. Sehingga dapat digunakan oleh para pemangku dan pengambil kebijakan di Kota Bukittinggi untuk mengevaluasi kembali perencanaan pembangunan yang sudah berlangsung maupun program pembangunan yang akan datang, apakah sudah *responsive gender*.
- b. Data terpilah perlu dijadikan isu strategis di seluruh sektor baik instansi pemerintah atau non pemerintah, lembaga masyarakat serta semua lini pembangunan mulai dari Tingkat Kota maupun tingkat kecamatan sampai kelurahan sehingga akan mempermudah komunikasi dan koordinasi dalam pembuatan format serta diskripsi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis gender dan anak.

2. Pengarusutamaan Gender

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bukittinggi tahun 2021 adalah 98,89, angka ini lebih tinggi dari pada IPG Propinsi Sumatera Barat yaitu 94,34 , yang berarti Pembangunan Manusia menurut gender telah terlaksana dengan baik.
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bukittinggi masih tergolong rendah yaitu 60,19, angka ini tergolong rendah disebabkan karena

masih rendahnya peran aktif wanita di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi,

- c. Persentase perempuan sebagai tenaga profesional pada 2021 sebesar 37,86 persen, menunjukkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan ekonomi dan sosial.
- d. Keterlibatan Perempuan di Parlemen adalah sebesar 8 % dan angka ini mempengaruhi terhadap pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender.

3. Kependudukan

- a. Dari proyeksi penduduk Kota Bukittinggi tahun 2021 menunjukkan bahwa ratio jumlah penduduk perempuan sama dengan jumlah penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,07%.
- b. Lebih dari seperempat penduduk perempuan perlu mendapatkan perhatian serius karena berkaitan dengan kelangsungan generasi yang akan lahir, perhatian yang sangat dibutuhkan berupa kesehatan dan status gizi yang optimal serta perlunya dibekali dengan pengetahuan tentang pola asuh yang sesuai dengan tumbuh kembang anak.
- c. Komposisi penduduk perempuan yang produktif perempuan yang produktif hampir sama banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang produktif.
- d. Pada tahun 2021 di Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa 99,94 % penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP Elektronik, Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya partisipasi dalam pengurusan KTP.
- e. Anak usia 0-18 tahun yang telah memiliki Akte Kelahiran adalah sebesar 94,18 % Sedangkan penduduk yang belum memiliki Akte Kelahiran masih terdapat sebanyak 5,11 % atau 2.188 orang.

- f. 3928 orang atau 15,83 % kepala keluarga di Kota Bukittinggi adalah perempuan, hal ini berarti perempuan haruslah memiliki kemampuan baik secara ekonomi, moral dan spiritual untuk menjadi pengambil keputusan di rumah tangganya.

4. Pendidikan

- a. Angka Partisipasi Sekolah Kota Bukittinggi sudah melebihi APS Propinsi Sumatera Barat , hal ini disebabkan akses pendidikan untuk penduduk usia sekolah , sehingga kesempatan dalam mengenyam pendidikan semakin besar.
- b. Persentase penduduk Kota Bukittinggi berumur 19 tahun ke atas yang melek huruf menurut jenis kelamin tahun 2021 adalah sebesar 99.5 % laki-laki dan 100% perempuan.
- c. Rata-rata lama sekolah Kota Bukittinggi tahun adalah 11,34. Ini berarti penduduk Bukittinggi sudah menuntaskan wajib belajar 9 tahun.
- d. Persentase penduduk Bukittinggi usia 5 tahun keatas yang telah menggunakan telepon seluler sebesar 95,13 (laki-laki) dan 95,46 (perempuan). Ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk usia 5 tahun keatas dan tertinggi di banding kabupaten kota di Sumatera Barat

5. Kesehatan

- a. Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi mencapai 74,5 tahun. artinya bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2021 memiliki kemungkinan untuk hidup hingga usia 74 atau 75 tahun. hal ini merupakan dampak dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
- b. Angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2021 di Kota Bukittinggi yaitu sebanyak 3 Jiwa. Kasus ini menurun dibandingkan kasus tahun sebelumnya disebabkan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal,

- c. Jumlah Kematian Bayi di Kota Bukittinggi tahun 2021 adalah sebanyak 4 kasus, atau Angka Kematian Bayi sebesar 2,3 /1.000 kelahiran hidup., diperlukan perhatian kesehatan khusus karena tubuh bayi usia kurang dari 1 bulan sangat lemah dan rentan terkena penyakit.
- d. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi tahun 2021 adalah 10,9 % sedangkan target nasional tahun 2024 adalah sebesar 14,%, akan tetapi terdapat 11.287 keluarga yang beresiko stunting.
- e. Pada tahun 2021 jumlah peserta KB aktif adalah sebanyak 10 674 orang sementara jumlah pasangan usia subur adalah 26.270 orang., maka CFR (*Contraceptive Prevalence Rate*) adalah 40,6 %.
- f. Usia perkawinan pertama sebagian besar warga Bukittinggi adalah pada usia 19 tahun lebih pada perempuan dan lebih dan sama 25 tahun.pada laki-laki., terdapat 21,58% orang laki-laki menikah di usia kurang dari 25 tahun dan 4,94% perempuan yang menikah di usia muda kurang dari 19 tahun.
- g. Perolehan penghargaan sebagai Kota Layak Anak tahun 2021 adalah kategori Madya

6. Ekonomi dan Ketenagakerjaan

- a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bukittinggi pada tahun 2021 sebanyak 67,42, tingkat partisipasi angkatan kerja laki- laki lebih banyak dari pada perempuan yaitu laki-laki 77,07 % berbanding 58,51% perempuan.
- b. Terdapat angka pengangguran terbuka sebesar 6,09 % , terlihat adanya perbedaan tingkat pengangguran terbuka antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki 6,64 % dan perempuan 5,42 %.
- c. Status pekerjaan penduduk perempuan Kota Bukittinggi yang berumur 15 tahun keatas yang terbanyak adalah yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai, yaitu 52,63%.

- d. Pada tahun 2021 terdapat jumlah penduduk miskin adalah 6.980 jiwa atau 5,14 % penduduk Bukittinggi yang berada dibawah garis kemiskinan.

7. Politik dan Pengambilan Keputusan

- a. Masih perlu dipersiapkan perempuan-perempuan yang berpotensi dan tertarik untuk terjun ke dunia politik praktis (legislatif), untuk dapat dipersiapkan duduk bersaing dengan laki-laki menjadi caleg caleg yang dipercaya masyarakat
- b. Masih sedikitnya Pengambil keputusan di Kota Bukittinggi yang berjenis kelamin perempuan, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil belum sepenuhnya memihak kepada kepentingan perempuan.

8. Hukum dan Sosial Budaya

- a. Kebijakan-kebijakan yang responsif gender di Kota Bukittinggi sudah mulai digerakkan terbukti sudah terdapatnya beberapa SKPD yang sudah memprakarsai perencanaan yang berbasis gender.
- b. Tahun 2021, terjadi penurunan jumlah wanita rawan sosial ekonomi dibandingkan tahun 2019, akan tetapi disebabkan karena adanya pandemic Covid 19, maka terjadi peningkatan di tahun 2020.
- c. Jumlah penyandang disabilitas Di Kota Bukittinggi Tahun 2021 adalah sebanyak 98 orang yang masih tergolong anak-anak.
- d. Permasalahan sosial masih memerlukan perhatian yang komprehensif dari semua pihak, karena pemecahan permasalahan sosial disebabkan oleh berbagai macam sebab, seperti ekonomi, keluarga, masyarakat dan pemahaman agama.

9. Kekerasan terhadap perempuan dan anak

- a. Perempuan yang mendapatkan kekerasan yang melapor dan ditangani oleh P2TP2A pada tahun 2021 adalah sebanyak 16 orang , terbanyak

pada usia dewasa. Disebabkan banyak factor yang mempengaruhinya, seperti factor emosional, ekonomi dan hal-hal lainnya.

- b. Kekerasan pada anak yang dilaporkan dan ditangani oleh P2TP2A tahun 2021 sebanyak 45 kasus, yang terdiri kekerasan terjadi secara Fisik, psikis dan sexual, penelantaran dan lainnya.
- c. Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dilaporkan belum dapat menggambarkan situasi yang sesungguhnya, karena budaya malu yang ada pada masyarakat kita masih menjadikan kasus kekerasan ini tidak semua yang dilaporkan. Disamping itu perlu upaya maksimal untuk memperkenalkan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bukittinggi ke masyarakat agar masyarakat tahu kemana harus melaporkan kekerasan yang dialami baik dirinya maupun lingkungan sekitarnya.

10. Indeks Ketahanan Keluarga

Hasil pengolahan dari data survey IKK yang dilaksanakan di Bukittinggi Tahun 2021 terhadap warga Kota Bukittinggi yang tersebar di 24 kelurahan. dengan jumlah 648 sampel diperoleh hasil IKK sebesar **74,35** yang termasuk kategori **Indeks Ketahanan Keluarga Tinggi**.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditulis pada buku Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2021 ini, maka ada beberapa hal yang dapat disarankan:

1. Perlu dilakukan koordinasi, kerjasama dan komunikasi yang lebih baik antar lembaga-lembaga yang terlibat dalam program pengarusutamaan gender dan anak untuk dapat mempersiapkan data dan informasi yang lebih lengkap, mudah dan efektif.
2. Perlu dilaksanakan pengkajian yang mendalam terhadap hasil analisa dan peranan masing-masing lembaga dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi keadilan dan kesetaraan gender di Kota Bukittinggi.

